

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Bambang Widianto

Deputi Seswapres Bidang Kesra
dan Penanggulangan Kemiskinan/
Sekretaris Eksekutif TNP2K

RAPAT KOORDINASI NASIONAL TKPK PROVINSI 2012

Jakarta | 26 November - 1 Desember 2012



PERAN DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN TKPK

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TKPK

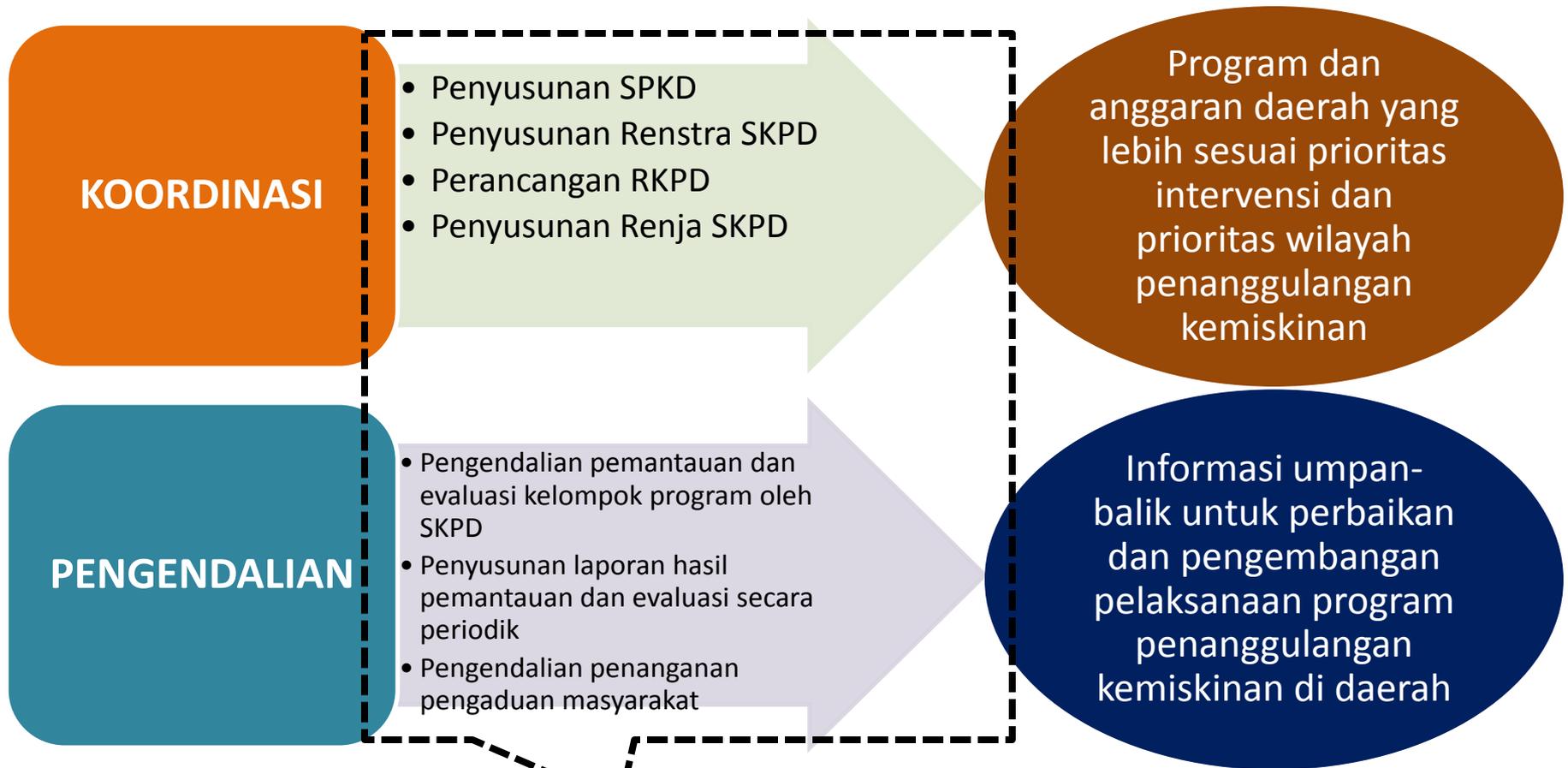
**Peraturan Presiden
No. 15 Tahun 2010**
tentang Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan

- Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15)

**Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 42
Tahun 2010** tentang
Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi
dan Kabupaten/Kota

- Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1)
- Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2)

PERAN KELEMBAGAAN TKPK

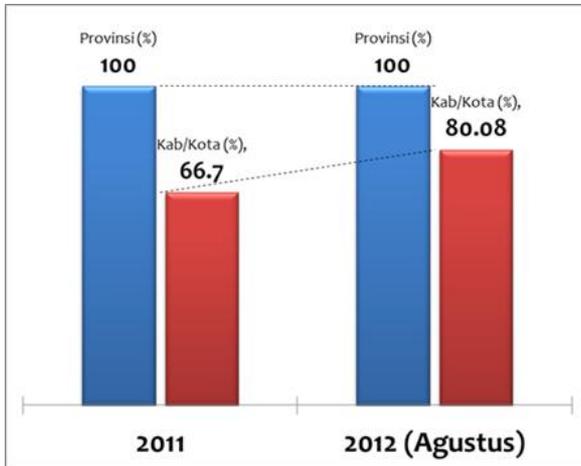


TNP2K mendukung TKPK melalui peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK (Pelatihan, Magang dan Konsultasi Teknis)

TUGAS TIM TEKNIS TKPK

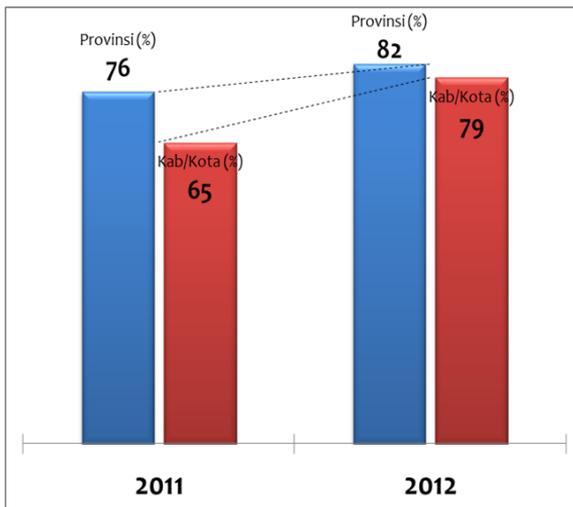
1. Mampu melakukan analisis terhadap kondisi kemiskinan di daerah dan mampu untuk menetapkan prioritas
2. Mampu melakukan analisis terhadap anggaran belanja daerah dan mendorong APBD yang pro poor
3. Mampu melakukan pemantauan kondisi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah

PEMBENTUKAN & OPERASIONALISASI TKPK DAERAH



TKPK Daerah Provinsi telah terbentuk di 33 provinsi di Indonesia.

Namun masih tersisa 20% kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK Bupati/Walikota untuk pembentukan TKPK Daerah.



Meskipun TKPKD sudah terbentuk, baru 82% Provinsi dan 79% kabupaten/kota yang telah mengalokasikan anggaran khusus yang memadai dalam APBD untuk mendukung operasionalisasi fungsi kelembagaan ini.

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) TAHUN 2011

TKPK Provinsi



Mayoritas TKPK Provinsi menyusun LP2KD, namun mayoritas TKPK Kabupaten/Kota tidak menyusun laporan ini.

Alasan yang umumnya dikemukakan (oleh tim teknis TKPK) adalah karena sekretariat tidak memiliki alokasi anggaran (insentif) khusus untuk keperluan ini. Alasan lain adalah lemahnya dukungan moril dan kontrol dari unsur pimpinan TKPK.

TKPK Kabupaten/Kota



DUKUNGAN TNP2K KEPADA TKPK DAERAH

- **Raker Teknis TKPK Daerah Tahun 2012**

Telah dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang pada bulan Oktober yang lalu untuk Prov, Kab/Kota bagian Barat, Tengah dan Timur. Raker Teknis diikuti oleh Bappeda Prov, Kab/Kota selaku Sekretariat TKPK Daerah

- **Pelatihan di 33 TKPK Daerah Provinsi**

Dilaksanakan oleh TKPK Provinsi, dihadiri oleh Satker terkait di Provinsi, Kab/Kota ybs.

- **Magang di Sekretariat TNP2K Jakarta**

Staf Satker terkait dari TKPK Provinsi, Kab/Kota mengikuti pelatihan singkat 1 hari di Sekretariat TNP2K. Total peserta magang sampai saat ini adalah 654 orang staf Pemda Prov, Kab/Kota.

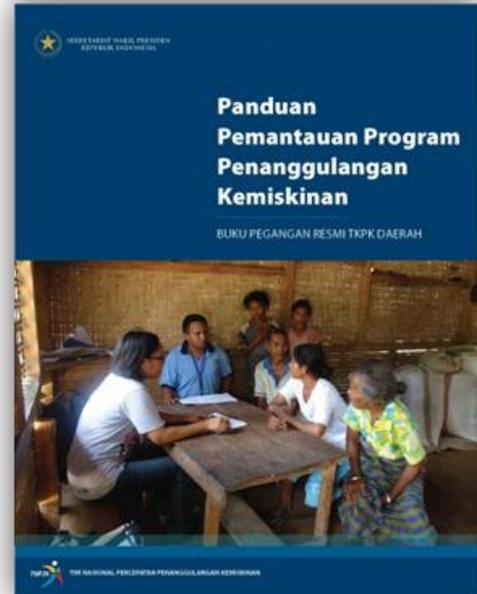
- **Sekretariat TNP2K menghadiri Rakor TKPK Daerah**

Tim Advokasi, Tim Klaster 1, dan Tim BDT menghadiri Rakor TKPK Daerah sebagai peninjau maupun narasumber

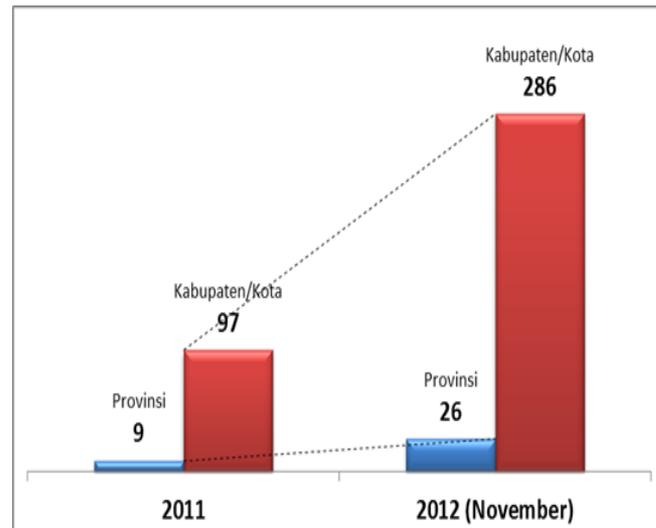
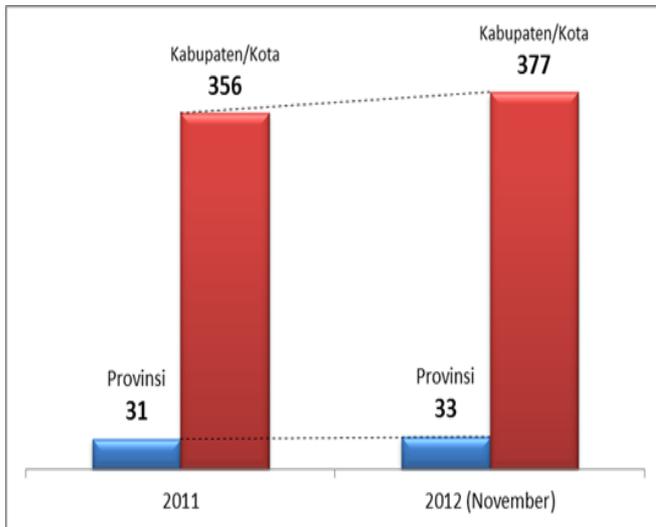
MATERI PELATIHAN DAN MAGANG

Sekretariat TNP2K telah menerbitkan 2 (dua) panduan kerja TKPK Daerah. Panduan ini berisikan materi:

- 1) Analisis kondisi kemiskinan daerah
- 2) Analisis prioritas intervensi (fokus dan lokus) penanggulangan kemiskinan daerah
- 3) Analisis relevansi, kecukupan dan efektivitas anggaran daerah
- 4) Pengantar metoda pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan



PARTISIPASI TKPK DALAM MAGANG & PELATIHAN



Tahun 2012, partisipasi tim teknis TKPK Provinsi maupun TKPK Kabupaten/Kota dalam pelatihan dan magang meningkat dibandingkan tahun 2011.

Pelatihan telah dilaksanakan di 33 provinsi, diikuti 377 TKPK Kab/Kota

Magang (s/d November 2012)

Telah diikuti 26 TKPK Provinsi (dibandingkan hanya 9 TKPK Provinsi di tahun 2011).

Dan telah diikuti oleh 286 Kab/Kota (dibandingkan 97 TKPK Kab/Kota di tahun 2011).

KINERJA KOORDINASI (1)

TKPK secara umum belum memfungsikan Rakor TKPK sebagai forum untuk membahas agenda percepatan penanggulangan kemiskinan

- Rakor TKPK belum benar-benar menjadi forum untuk mengevaluasi dan merancang penajaman strategi dan program penanggulangan kemiskinan.
- Rakor TKPK umumnya masih sangat seremonial dan hanya untuk menyediakan forum pemaparan singkat tentang kondisi umum kemiskinan di setiap daerah, tanpa ada pembahasan tentang implikasi kebijakan yang positif untuk menangani permasalahan kemiskinan yang ada.

KINERJA KOORDINASI (2)

Namun dapat ditemukan beberapa contoh kinerja positif

- 1. TKPK Provinsi Banten telah memfasilitasi penyelesaian Renja Penanggulangan Kemiskinan Lintas SKPD Provinsi untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.** TKPK Provinsi Banten juga mengoordinasikan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jamsosratu, yaitu replikasi plus dari Program PKH di tingkat Provinsi dengan biaya yang sepenuhnya berasal dari APBD Provinsi Banten.
- 2. TKPK Provinsi Kalimantan Selatan tengah mengoordinasikan penyusunan suatu Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan yang terkonsolidasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.** Untuk menghindari tumpah-tindih kebijakan, dan strategi mobilisasi sumber pembiayaan non-pemerintah, khususnya swasta, untuk penanggulangan kemiskinan.

KINERJA KOORDINASI (3)

Namun dapat ditemukan beberapa contoh kinerja positif

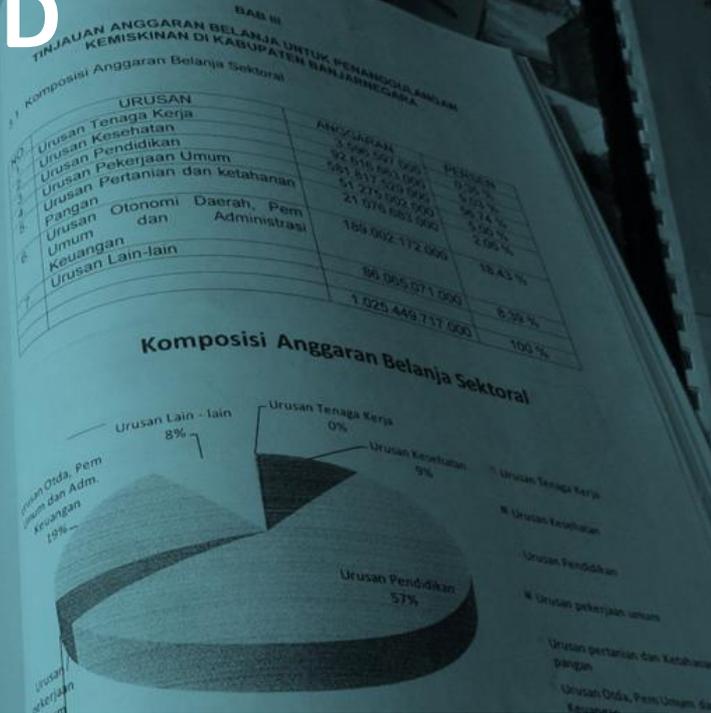
- 3. TKPK Provinsi Riau, bekerjasama dengan TKPK Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi setempat menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah** dengan fokus pada strategi pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat miskin di sektor pertanian dan perkebunan. Penyusunan strategi ini terutama mengacu kepada Basis Data Terpadu Kemiskinan, hasil PPLS 2011.
- 4. TKPK Provinsi NTB tengah mengkoordinasikan perencanaan pemberian tambahan bantuan dana** (untuk periode Tahun Anggaran 2013) kepada semua kabupaten/kota untuk mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan di sektor ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan dan ekonomi.

REVIEW LP2KD

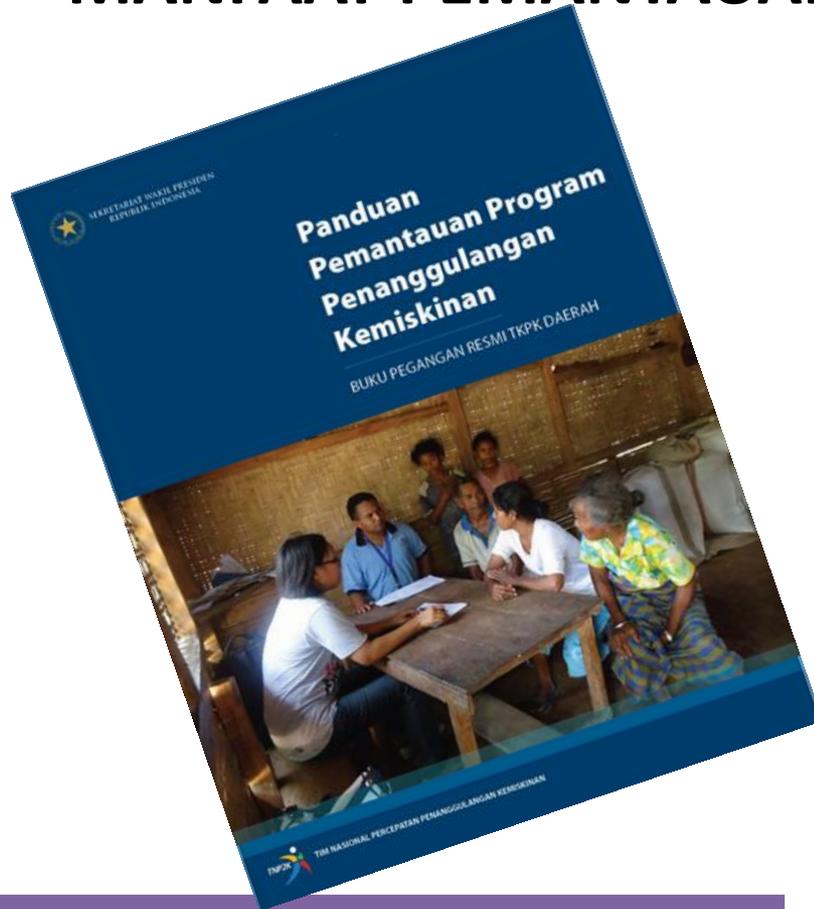
- TKPK umumnya memahami tujuan dan metodologi analisis kemiskinan dan intervensi penanggulangannya.
- Tetapi sebagian besar TKPK kesulitan dalam mengembangkan analisis karena keterbatasan data di daerah. Khususnya data indikator terkait kemiskinan dan data anggaran sektoral.

- Sebagian besar TKPK Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi TKPK.
- Tetapi agenda yang dibahas umumnya belum fokus pada upaya perencanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

- TKPK umumnya mampu mengidentifikasi keberadaan program nasional maupun program daerah untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
- Tetapi mayoritas TKPK kesulitan melaporkan perkembangan proses pelaksanaan dan hasil program, karena akses yang sangat terbatas terhadap informasi hasil pemantauan dan evaluasi program.



MANFAAT PEMANTAUAN PROGRAM BAGI DAERAH



Informasi hasil pemantauan dapat menjelaskan **upaya antisipasi risiko** yang perlu dilakukan untuk menjaga tercapainya target kinerja program.

Informasi hasil pemantauan dapat menjelaskan **kebutuhan perbaikan mekanisme pengelolaan program** (prosedur, jadwal dan realisasi anggaran) penanggulangan kemiskinan di daerah

Informasi hasil pemantauan dapat menjelaskan **kontribusi yang dapat diberikan oleh daerah** dalam mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah: sinergi pusat - daerah

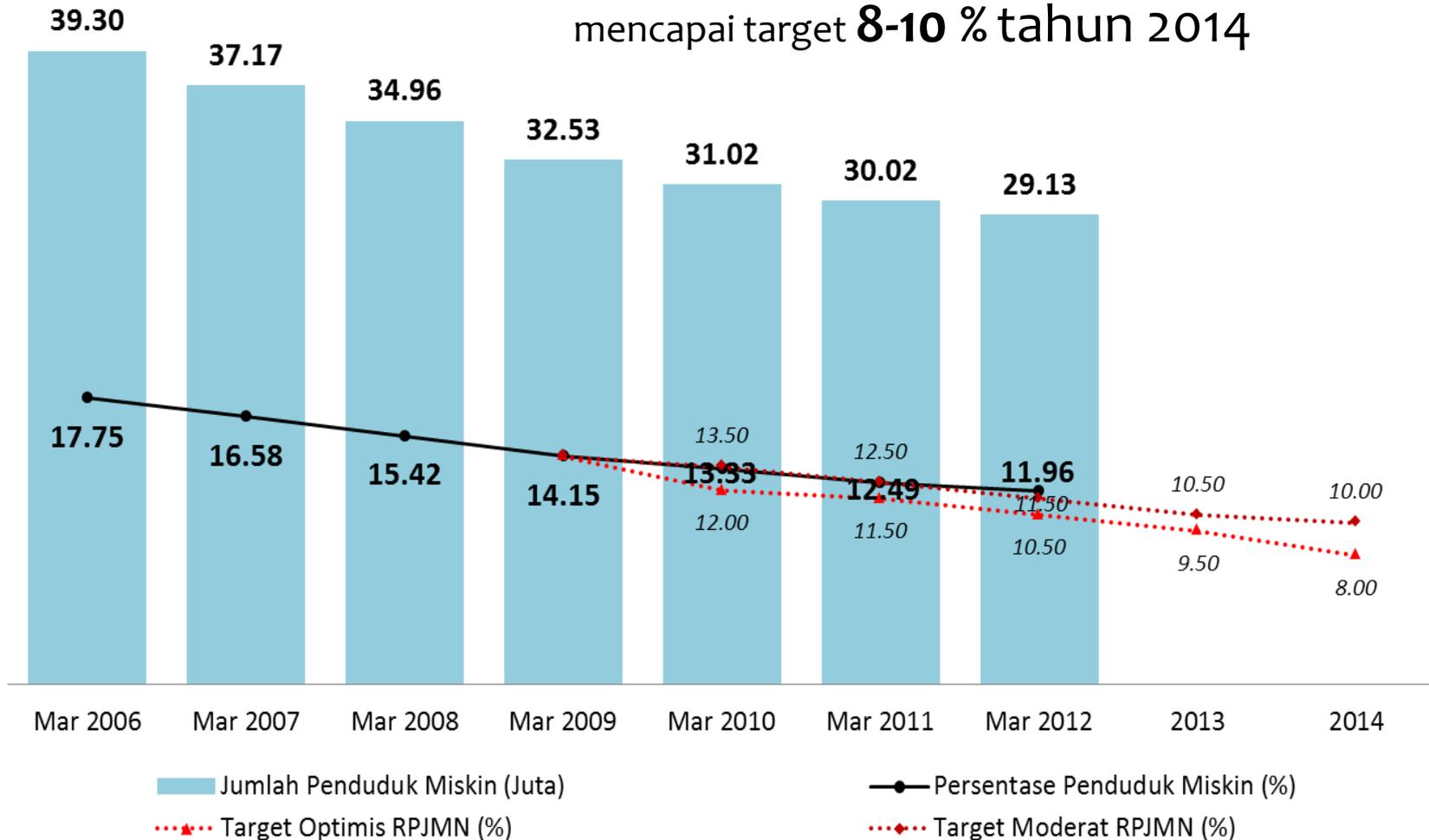


2

TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

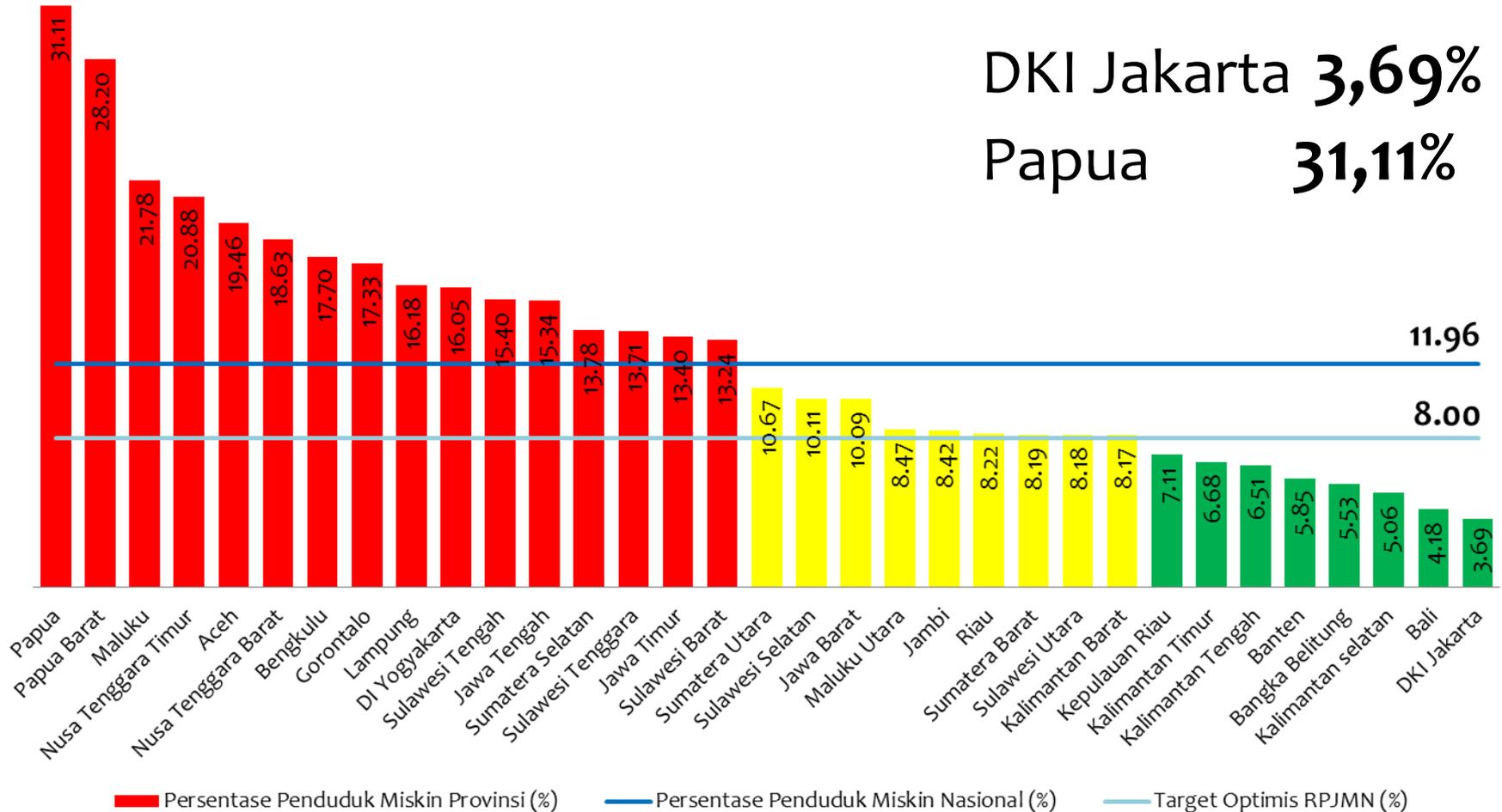
TARGET DAN CAPAIAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

- Tahun 2006-2012, jumlah maupun persentase penduduk miskin nasional terus menurun.
- Percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan untuk mencapai target **8-10 %** tahun 2014



Sumber: BPS – Susenas

KESENJANGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN ANTARWILAYAH

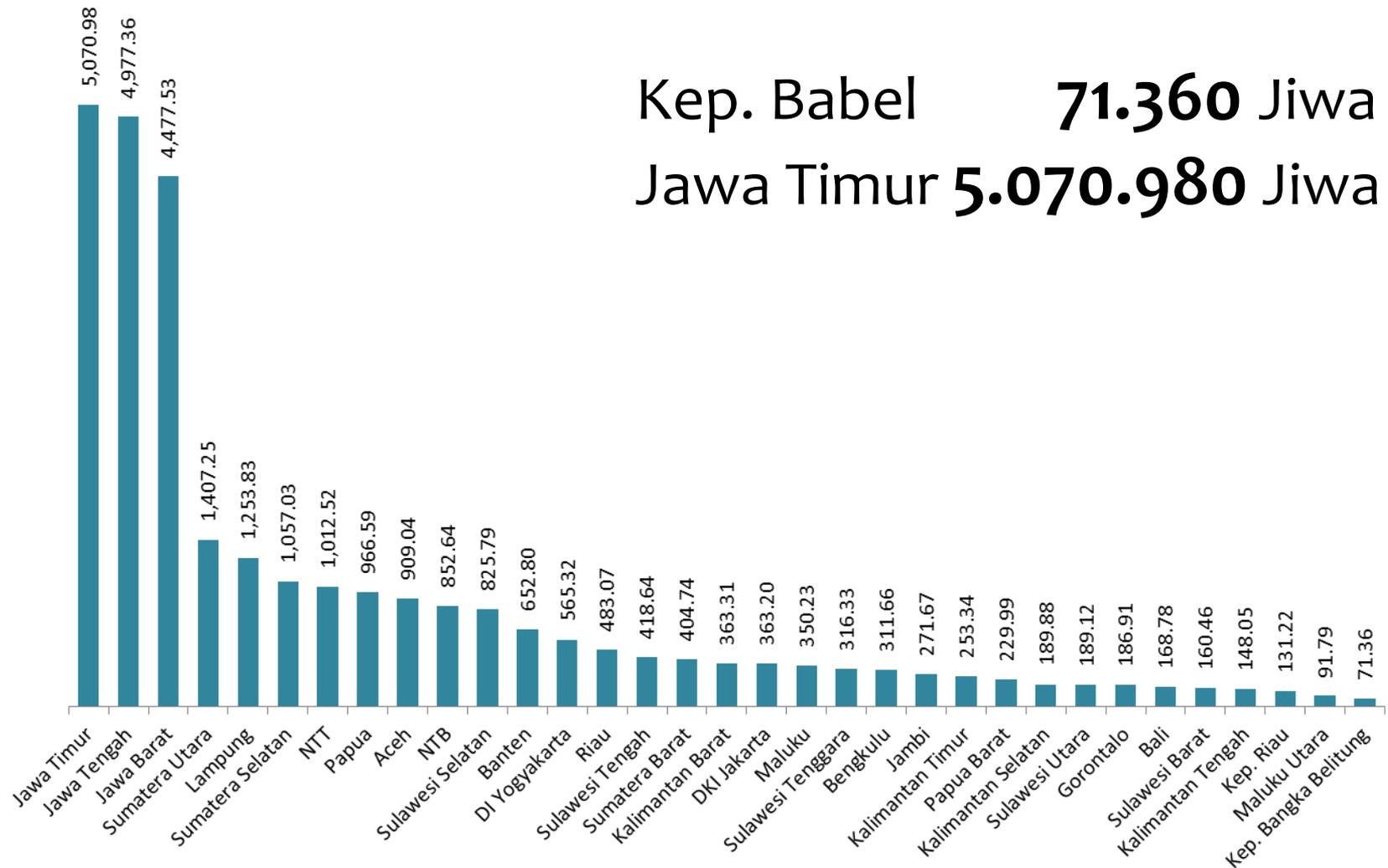


DKI Jakarta **3,69%**
Papua **31,11%**

Sumber: BPS – Susenas (Maret 2012)

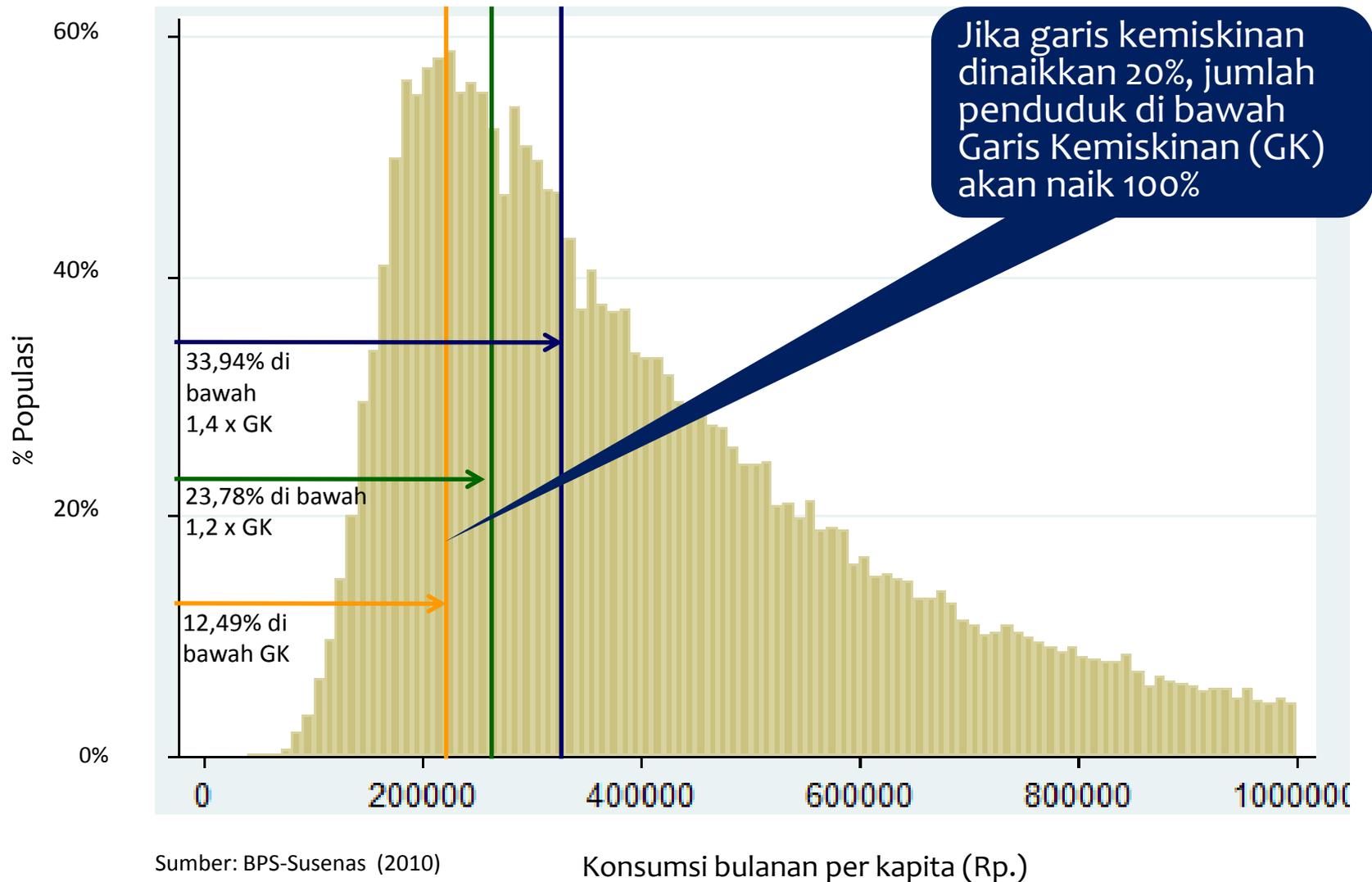
KETIDAKMERATAAN SEBARAN PENDUDUK MISKIN ANTARWILAYAH

Kep. Babel **71.360** Jiwa
Jawa Timur **5.070.980** Jiwa



Sumber: BPS (2012)

KERENTANAN TERHADAP KEMISKINAN (1)



KERENTANAN TERHADAP KEMISKINAN (2)

		2009			Total (%)
		<i>Miskin (%)</i>	<i>Hampir Miskin (%)</i>	<i>Tidak Miskin (%)</i>	
2008	<i>Miskin (%)</i>	46.71	20.28	33.01	100.00
	<i>Hampir Miskin (%)</i>	22.32	21.53	56.15	100.00
	<i>Tidak Miskin (%)</i>	5.37	7.65	86.98	100.00

Sumber: BPS - Susenas

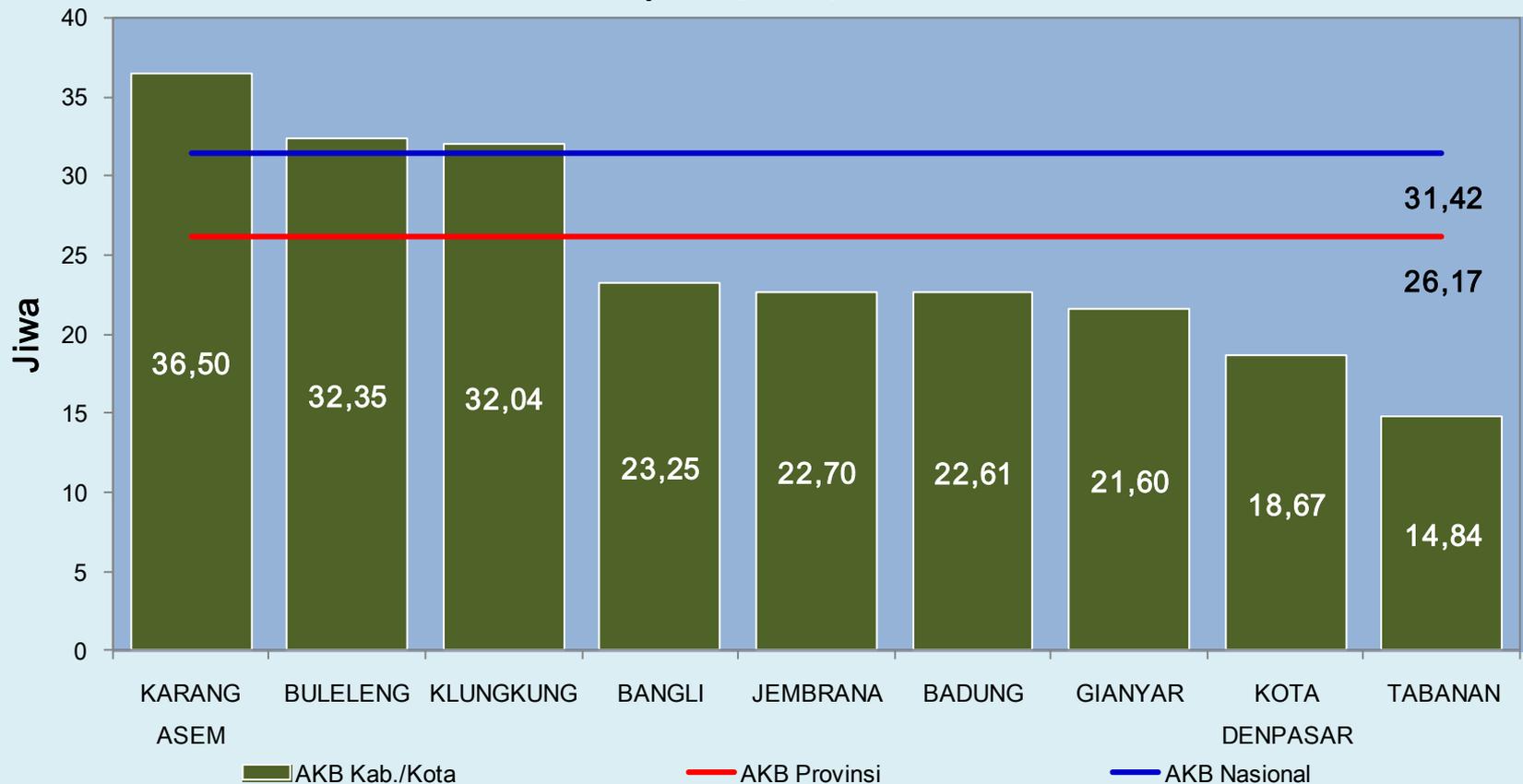
- **53%** penduduk Miskin tahun 2008 keluar dari kemiskinan (menjadi Hampir Miskin dan Tidak Miskin) pada tahun 2009.
- Sebaliknya **22,32%** penduduk Hampir Miskin tahun 2008 menjadi Miskin pada tahun 2009. Pada saat yang sama **5.37%** penduduk Tidak Miskin Miskin.

Miskin	< GK
Hampir Miskin	1 – 1,2 GK
Tidak Miskin	> 1,2 GK

KETIDAKMERATAAN INDIKATOR KESEHATAN ANTARWILAYAH

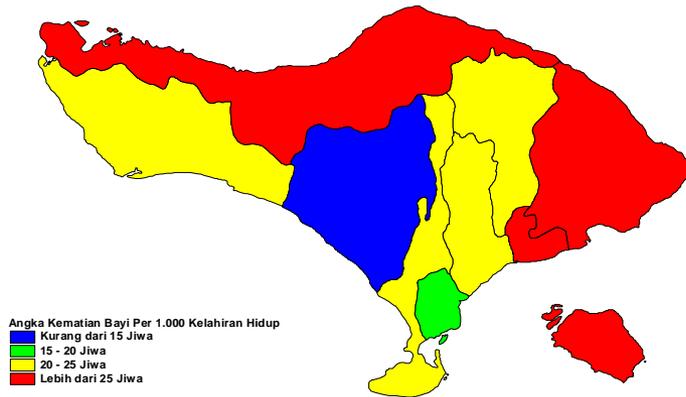
CONTOH KASUS DI PROVINSI BALI

Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali 2009

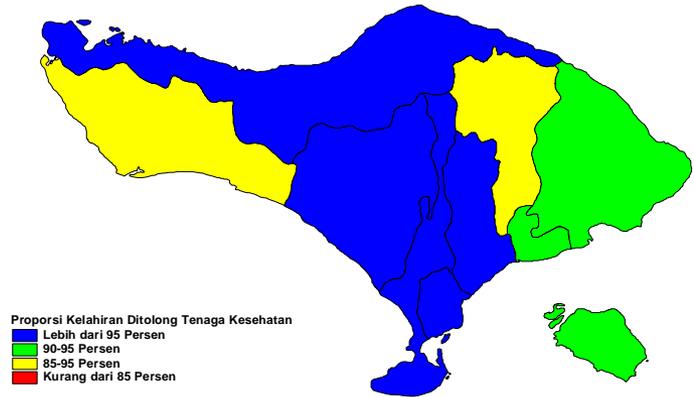


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

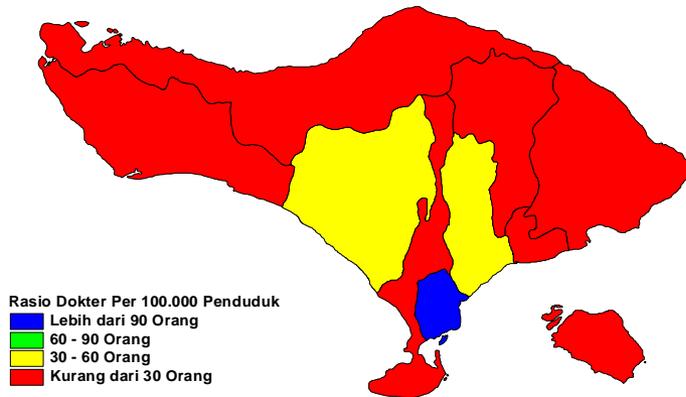
ANGKA KEMATIAN BAYI DAN INDIKATOR PENDUKUNGNYA



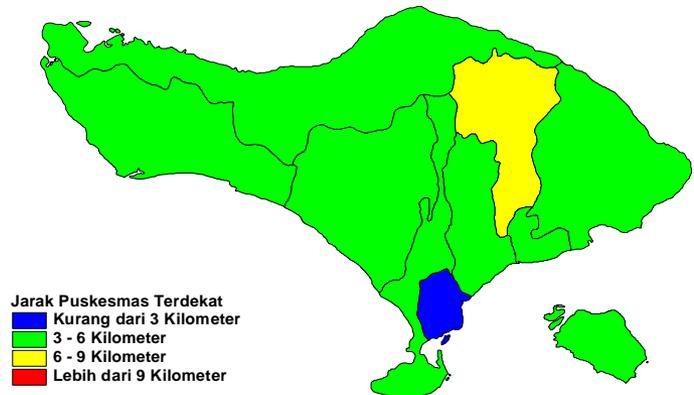
Angka Kematian Bayi



Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan



Rasio Dokter

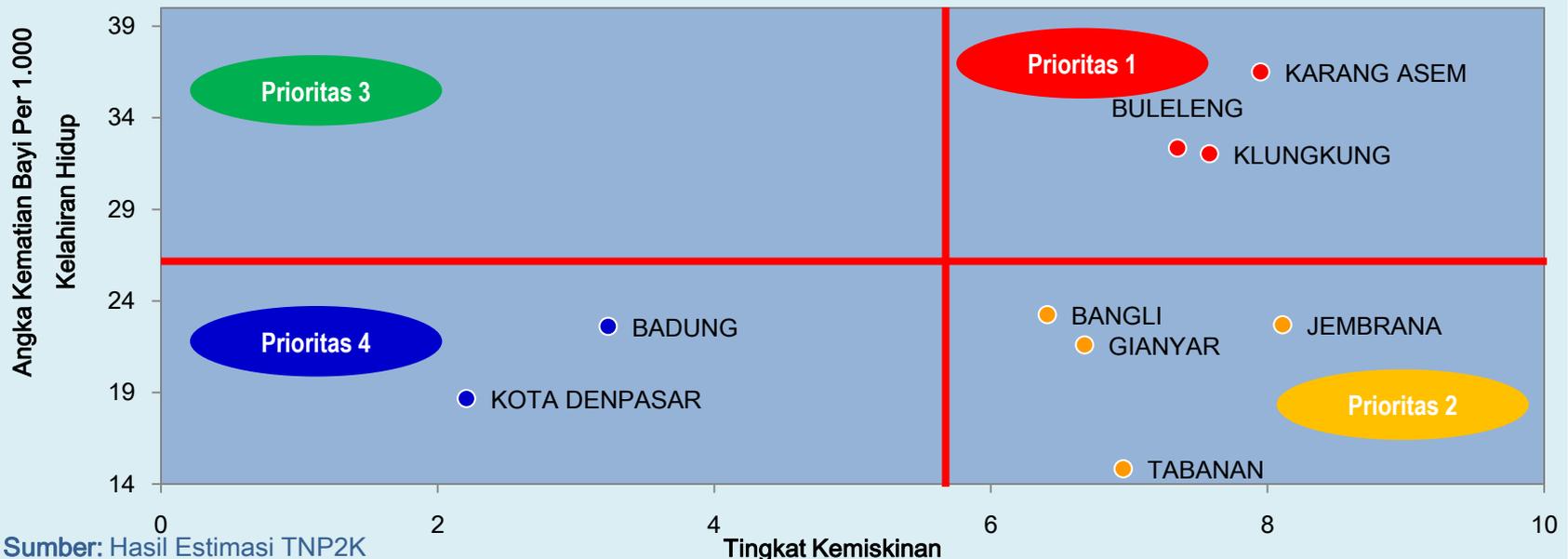


Jarak Puskesmas Terdekat

ANALISIS PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS

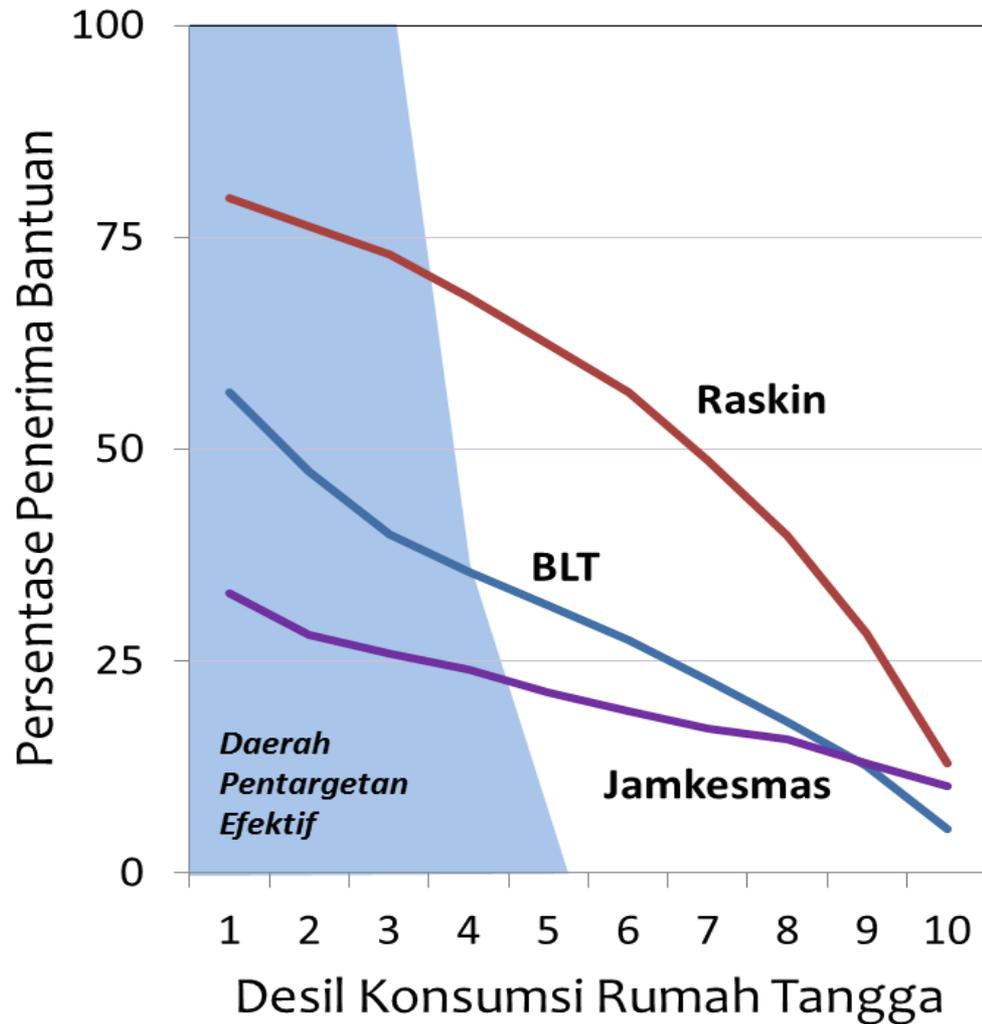
Contoh Kasus

Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Di Bidang Kesehatan Provinsi Bali 2009



Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka kematian bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. Prioritas Pertama adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan AKB tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan AKB dengan target kelahiran yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah tersebut adalah: Kabupaten Karang Asem, Buleleng dan Klungkung.

EFEKTIVITAS PENARGETAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Hanya sekitar **30%** penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)

Sumber: Susenas 2009

PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERBASIS INDIVIDU, RUMAH TANGGA ATAU KELUARGA

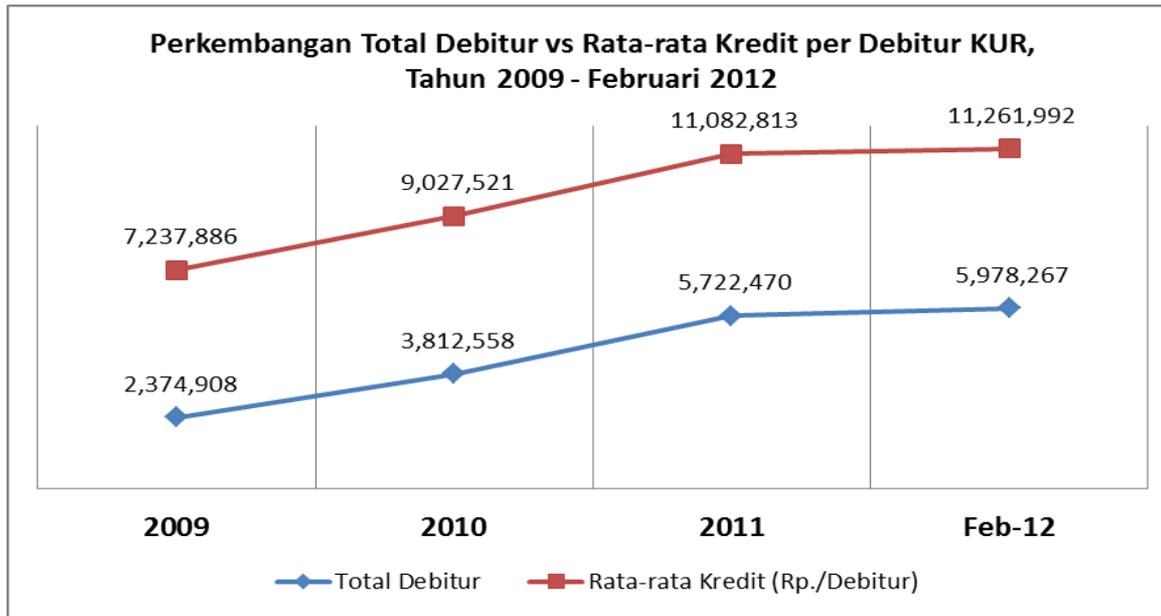
		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin
1 Resiko Kesehatan	Kesehatan Dasar ↑ ↓ Catastrophic	PKH	Jamkesmas (Seluruh peserta PKH otomatis peserta Jamkesmas)	
	2 Keberlanjutan Pendidikan	Pendidikan Dasar ↑ ↓ Pendidikan Tinggi	PKH (s/d SLTP)	Bantuan pendidikan (Terintegrasi memastikan keberlanjutan jenjang, Seluruh peserta PKH otomatis mendapatkan bantuan pendidikan)
3 Guncangan Ekonomi	Ketidakmampuan ↑ ↓ Dampak kebijakan	PKH	Raskin	
		Cash for work		Bantuan tunai
Pada kondisi krisis dimungkinkan program perlindungan lainnya				

PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT

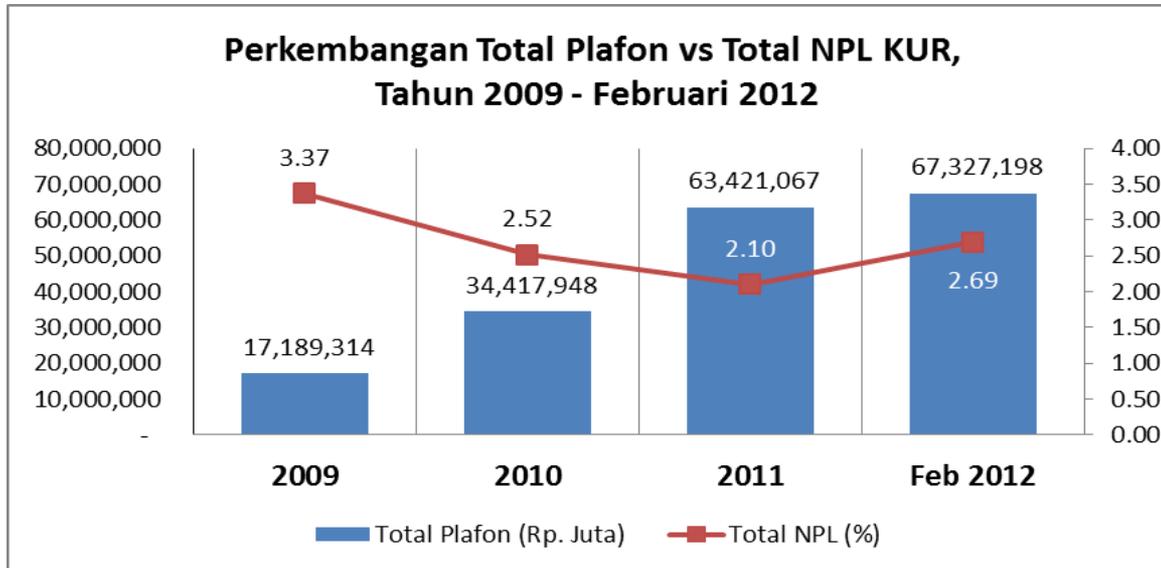
PROGRAM	SASARAN
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Kelompok Masyarakat Umum
a. PNPM Mandiri Perdesaan	Kelompok Masyarakat Perdesaan
b. PNPM Mandiri Perkotaan	Kelompok Masyarakat Perkotaan
c. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus	Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
d. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
e. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah (PISEW)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
f. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)	Kelompok Masyarakat Pertanian Perdesaan
g. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
h. PNPM Pariwisata	Kelompok Masyarakat Perdesaan Potensial
i. PNPM Generasi	Kelompok Masyarakat Perdesaan
j. PNPM Green Kecamatan Development Program (G-KDP)	Kelompok Masyarakat Perdesaan
k. PNPM Neighbourhood Development (ND)	Kelompok Masyarakat Perkotaan

PROGRAM BERBASIS PELAKU UMK (1)

Realisasi KUR



- Selama 2009-2012 (Februari), Total Debitur maupun Rata-Rata Kredit per Debitur meningkat

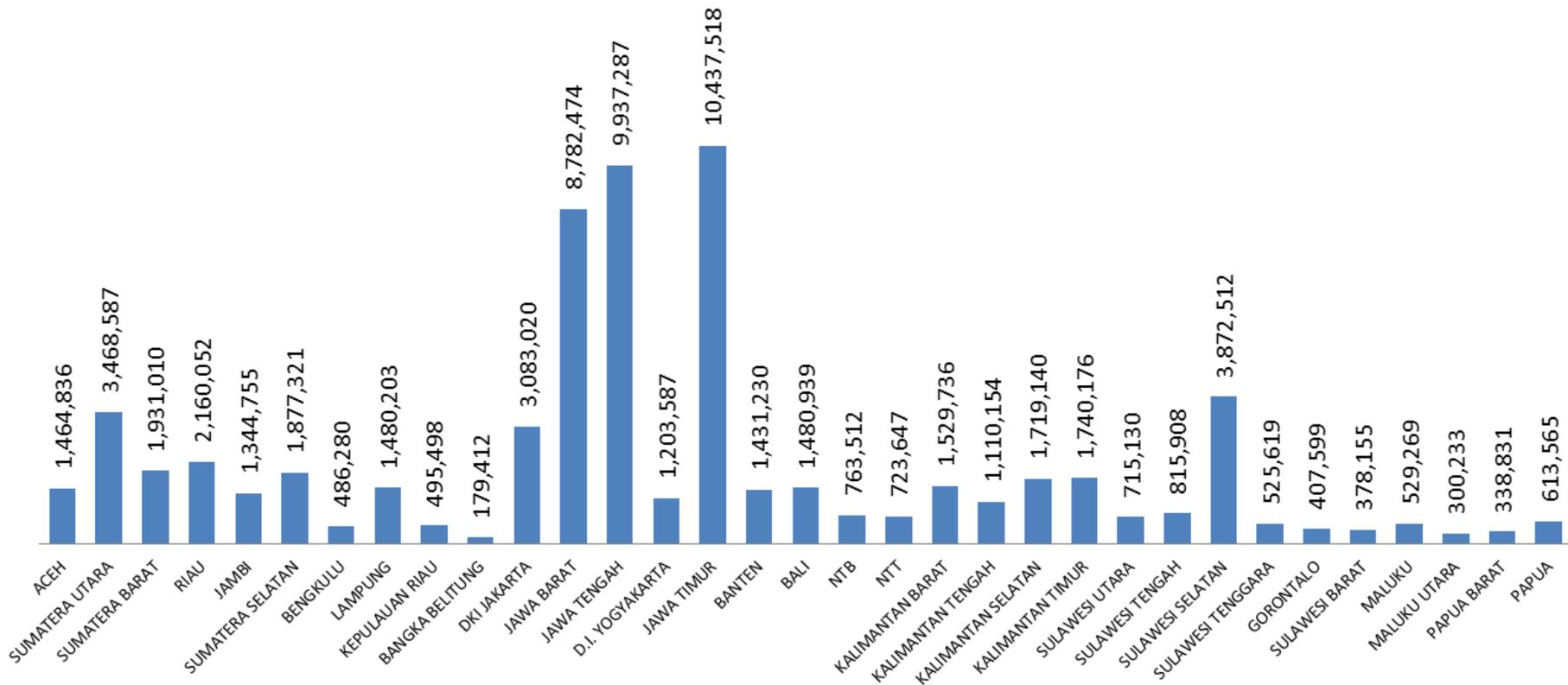


- Selama 2009-2012 (Februari), Total Plafon meningkat; dan NPL cenderung menurun

PROGRAM BERBASIS PELAKU UMK (2)

Realisasi KUR

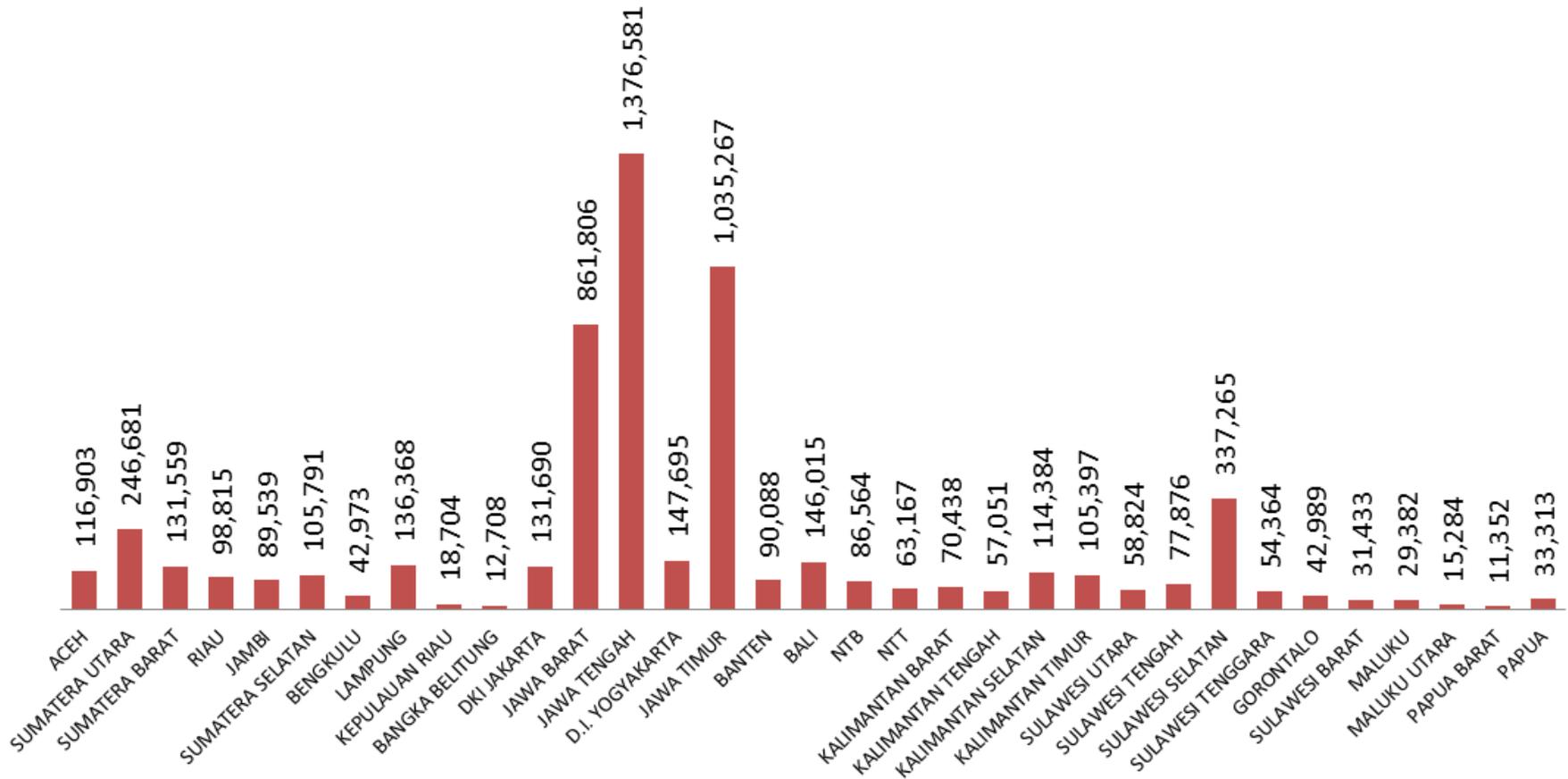
Total Plafon KUR (Rp. Juta) menurut Provinsi, Per Februari 2012



PROGRAM BERBASIS PELAKU UMK (3)

Realisasi KUR

Total Debitur menurut Provinsi, per Februari 2012



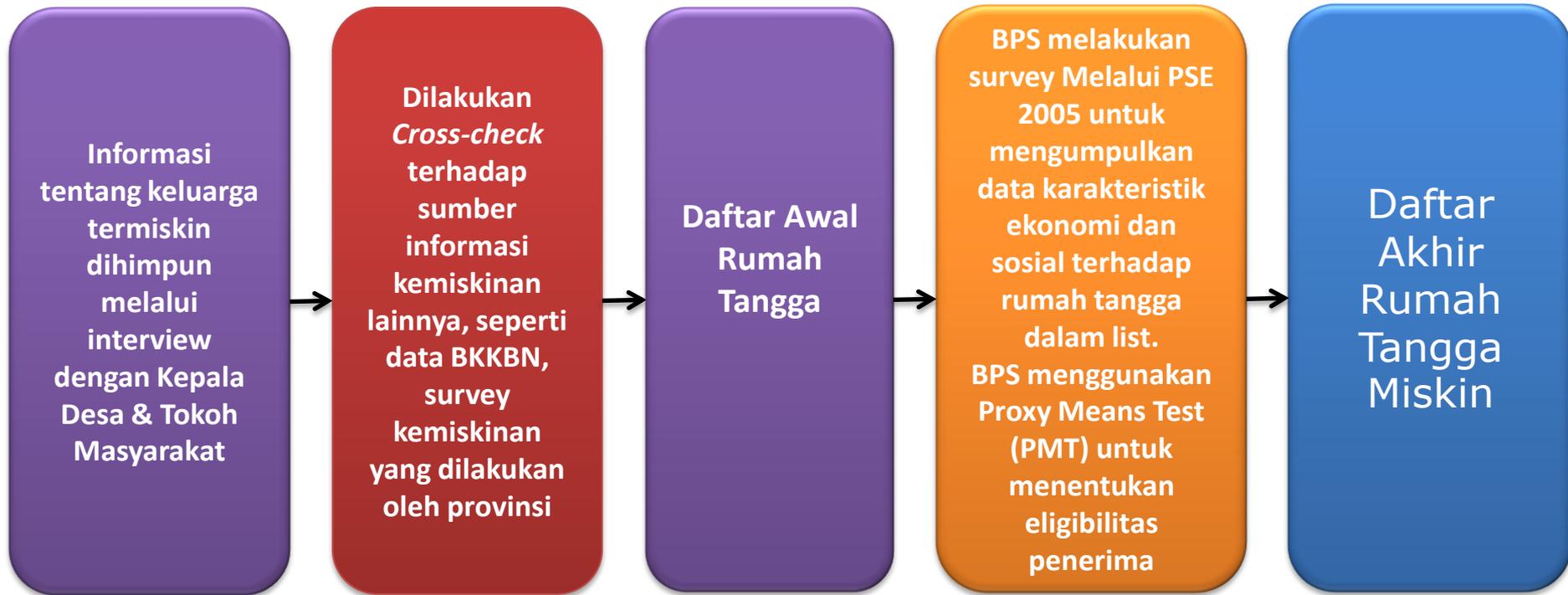


3

BASIS DATA TERPADU

METODE PENGUMPULAN DATA

GENERASI PERTAMA: PSE 2005



KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN DALAM PSE 2005

1. Luas lantai rumah kurang dari 8 M²
2. Jenis lantai rumah tidak permanen
3. Jenis tembok rumah tidak permanen
4. Tidak memiliki sanitasi atau sanitasi bersama
5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ sumber air yang tidak terlindungi/air hujan.
7. Konsumsi daging sapi/susu/ayam sekali seminggu
8. Konsumsi makanan lebih dari 80% pendapatan
9. Pendapatan informal kurang dari Rp. 350.000/month
10. Tidak memiliki tabungan atau barang yang bernilai diatas Rp. 500.000

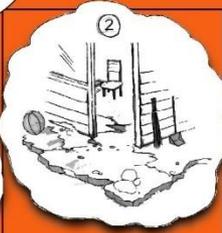
Pak siapa saja sih yang berhak mendapatkan dana kompensasi BBM?

Yang berhak adalah rumah tangga yang memenuhi 9 atau lebih dari 14 ciri rumah tangga miskin seperti berikut ini

Kriteria Rumah tangga Miskin



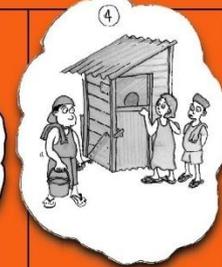
Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang



Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan



Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa di plester



Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain



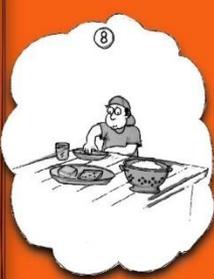
sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik



sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan



bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah



hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu



hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun



hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari



tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik



Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: Petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan



pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD



Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah di jual dengan nilai minimal Rp.500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya

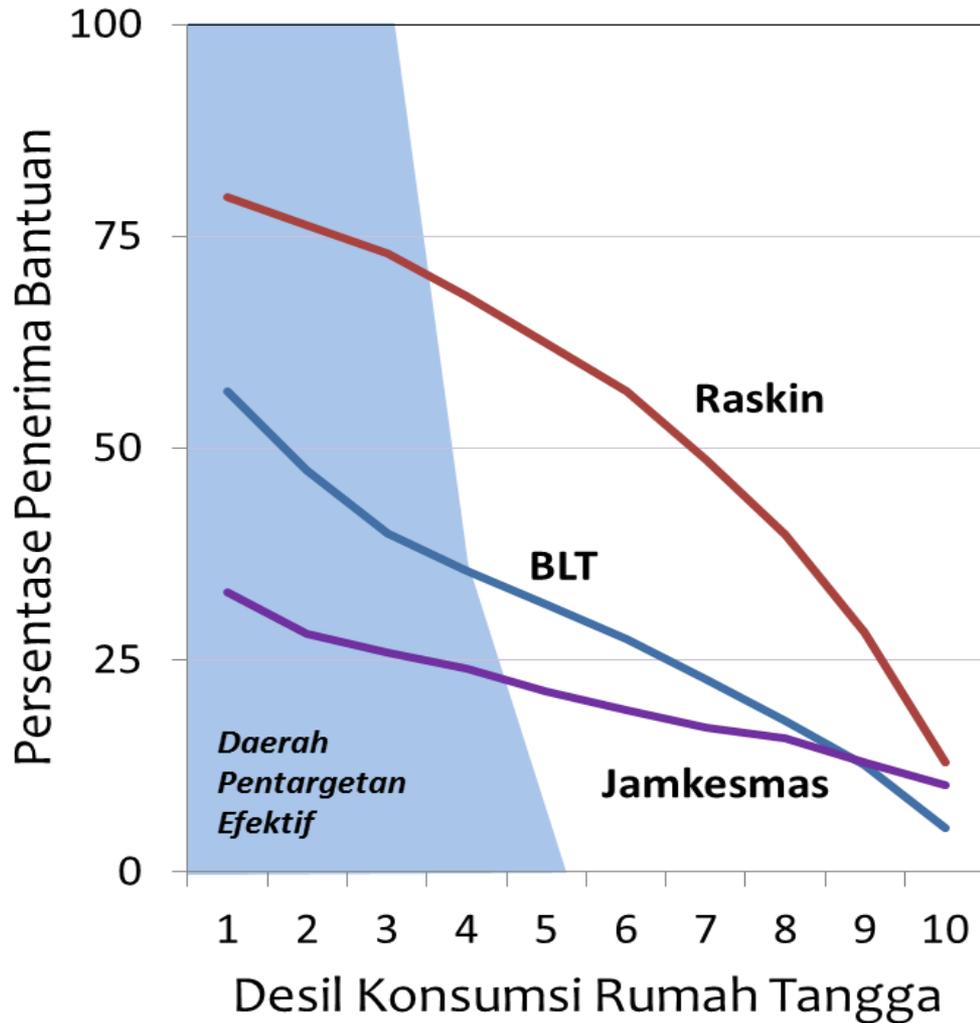
Oh.. sedangkan yang TIDAK memenuhi syarat untuk mendapatkan SLT adalah: a) Rumah tangga yang hanya memenuhi 1-8 ciri rumah tangga miskin, b) PNS, TNI, Polri/ pensiunan, c) Pengungsi yang di urus oleh pemerintah, dan d) Penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal

Ya benar, selain itu harap diingat juga: 1. Pembayaran SLT dilakukan hingga 31 Desember 2005, jadi tidak perlu berbondong-bondong ke kantor pos pada saat yang sama. Sabar aja... 2. Bila anda merasa miskin tapi belum terdaftar, silahkan melapor ke posko sampai dengan 31 Oktober 2005 untuk dinilai pantas atau tidaknya menerima SLT. 3. Bagi siapa saja baik petugas maupun masyarakat yang memberikan data tidak benar akan ditindak tegas dan dikenakan hukum pidana

Yang tidak miskin jangan ngaku-ngaku miskin, malu ah!



EFEKTIVITAS PENARGETAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL



Hanya sekitar **30%** penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)



Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan

Sumber: Susenas 2009

PERBAIKAN METODE PENGUMPULAN DATA PPLS 2011

Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error

	Miskin	Tidak Miskin
Menerima Bantuan	<input checked="" type="checkbox"/>	× <i>Inclusion Error</i>
Tidak Menerima Bantuan	× <i>Exclusion Error</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga



PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU



Perbaiki Metodologi:

- Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs. 29% pada tahun 2008)
- Penggunaan Sensus Penduduk sebagai starting point
- Pelibatan Komunitas Miskin
- Variabel yang dikumpulkan lebih banyak → Prediski rumah tangga miskin lebih baik
- Perbaiki metode Proxy Mean Testing (PMT)

PENDATAAN RUMAH TANGGA SASARAN

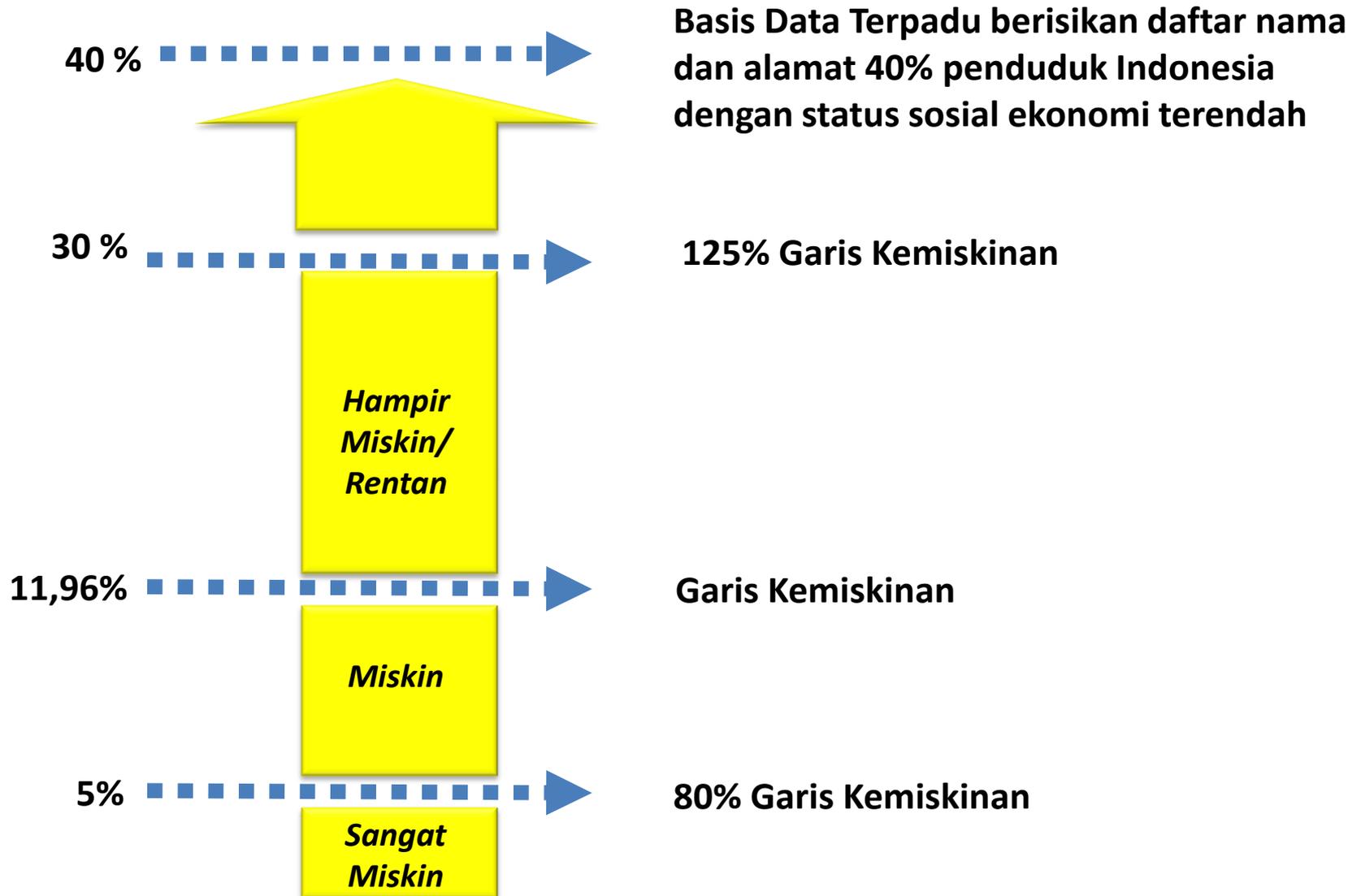
- Melibatkan 120.000 pencacah
- Dengan memanfaatkan daftar awal, pencacah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Pendataan dilakukan untuk setiap rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah (door to door dan bukan sampel). Pendataan dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait variabel yang diduga berkaitan erat dengan status kesejahteraan, seperti: kondisi rumah, kepemilikan aset, dll.
- Daftar awal memuat 45% dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terbawah. Sasaran basis data terpadu adalah 40% daftar RTS dengan status kesejahteraan terendah. Sehingga tidak semua rumah tangga dalam daftar awal akan menjadi basis data terpadu.
- Hasil PPLS 2011, diserahkan kepada TNP2K untuk diolah menjadi basis data terpadu. Kementerian yang mempunyai program bantuan sosial dapat mendapatkan data RTS dengan menyampaikan kriteria eligibilitas.

BASIS DATA TERPADU PEMODELAN PMT



- Dengan menggunakan informasi dari PPLS, indeks konsumsi rumah tangga dihitung dengan:
Index = f (household & regional characteristics)
- Karakteristik rumah tangga meliputi kondisi & status kepemilikan rumah, aset, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dll.
- Selanjutnya, rumah tangga dapat dirangking berdasarkan indeks tersebut.
- Formula yang digunakan untuk masing-masing kabupaten/kota tidak sama.

CAKUPAN BASIS DATA TERPADU



BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

**Kriteria Kepesertaan
Program Perlindungan Sosial**

Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

**Basis Data Terpadu Untuk
Program Perlindungan Sosial**

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu

Jamkesmas

Subsidi
Siswa
Miskin

Program
Keluarga
Harapan

Raskin

*Daftar nama dan alamat individu/
keluarga/ rumah tangga sasaran
masing-masing program*

**Program Perlindungan Sosial lainnya
Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga**

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Dikelola oleh UNIT PENETAPAN SASARAN NASIONAL, di bawah Sekretariat TNP2K dengan 3 (tiga) tugas utama:

1

Menyediakan Layanan Program

- Memastikan Basis Data Terpadu dapat dimanfaatkan oleh Program Perlindungan Sosial , dengan bekerja sama dengan penyelenggara program
- Memberi dukungan teknis kepada pengguna basis data terpadu

2

Melakukan Riset

- Memastikan kesahihan berbagai studi untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Basis Data Terpadu

3

Membangun Sistem Informasi

- Manajemen Basis Data Terpadu berbasis teknologi informasi
- Penyajian beragam informasi dari basis data terpadu melalui media berbasis teknologi informasi

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Sekretariat TNP2K telah berkoordinasi dengan beberapa K/L memastikan penggunaan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial

Jamkesmas

- Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu sebagai basis kepesertaan tahun 2012

Raskin

- Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu mulai Juni 2012, dengan metode penyaluran baru

PKH

- Menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk ekspansi 2012 menuju 3 juta cakupan tahun 2014

Subsidi Siswa

- Komitmen penggunaan, sedang diupayakan teknis sinkronisasi data dengan Kemdikbud

Pemda

- Sejumlah Pemda telah meminta nama & alamat dari Basis Data Terpadu untuk Program yang dijalankan Daerah

Basis Data Terpadu juga dapat diakses oleh instansi Pemerintah lainnya untuk keperluan khusus seperti monitoring dan evaluasi (contoh oleh UKP4)

PENGGUNAAN BASIS DATA TERPADU

3 JENIS DATA YANG TERSEDIA

Data Individu DENGAN Nama & Alamat

- Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial
- Pengguna: kementerian/lembaga pelaksana program baik pusat maupun daerah
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi tentang deskripsi dan sasaran program – dapat berdiskusi dengan staf teknis TNP2K

Data Individu TANPA Nama & Alamat

- Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat maupun
- Pengguna: Pemerintah pusat & daerah, lembaga penelitian, NGO, dll.
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna

Data Agregat/distribusi tingkat Kecamatan

- Untuk tujuan perencanaan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- Dapat diakses melalui website TNP2K



4

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

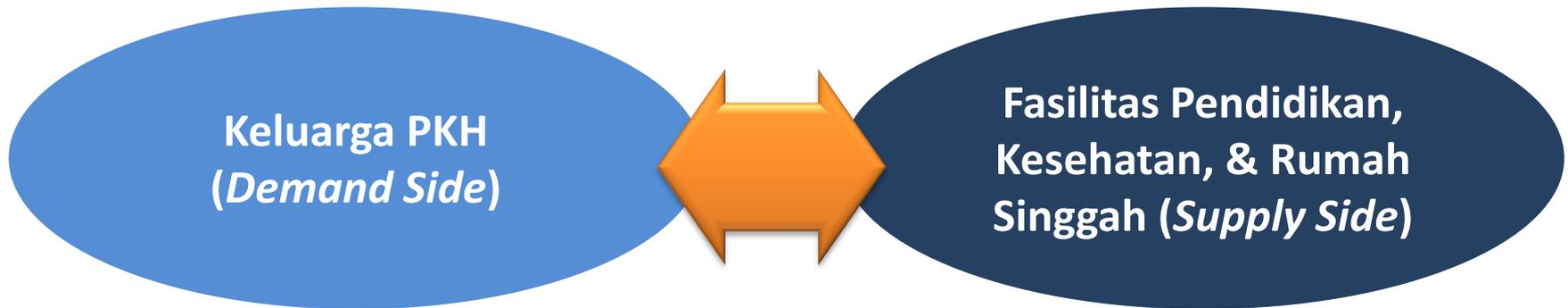
PERENCANAAN PKH s/d 2014

	2011	2012	2013	2014
Keluarga sasaran (juta)	1,116	1,516	2,4	3,0
Provinsi	25	33	33	33
Kabupaten/Kota	103	166	350	500
Kecamatan	1.151	1.551	2.667	3.342
Desa	13.641	21.471	29.301	37.131
Kebutuhan dana (Rp triliun)		1,8	3,2	4,2

Sumber: Kementerian Sosial dan TNP2K

Catatan: Agar dapat dialokasikan 2 kali pembayaran bagi keluarga sasaran baru di tahun 2013 (sebesar 884 ribu keluarga), maka diperlukan aktifitas persiapan pembayaran di tahun 2012. Akan ada dampak pada komposisi biaya administrasi, namun hal tersebut dapat dibenarkan karena akan menciptakan efisiensi pelaksanaan program di tahun anggaran berikutnya.

PKH ADALAH PROGRAM NASIONAL



Kementerian Sosial

Memastikan kesediaan Keluarga untuk mengikuti program: Pendampingan, Pemantauan Kepatuhan, dan Pembayaran

Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Kesehatan

- Layanan fasilitas pendidikan & kesehatan,
- Pencatatan kehadiran di fasdik/faskes untuk verifikasi kepatuhan program → tugas tambahan bagi staf fasdik/faskes

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Sosial

- Layanan rumah singgah (*shelter*) bagi anak jalanan dan pekerja anak.

KOMPLEMENTARITAS PROGRAM MENGUNAKAN BASIS DATA TERPADU

RASKIN

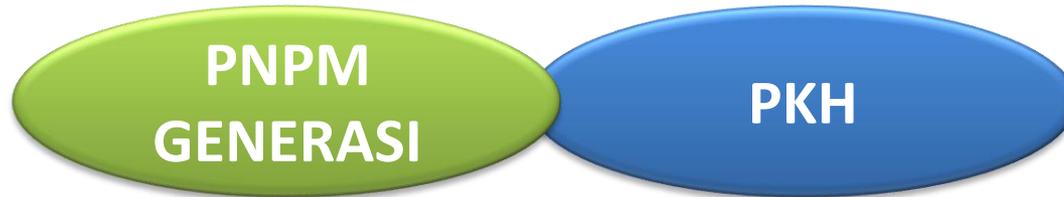
JAMKESMAS

PKH

BANTUAN
PENDIDIKAN

- Karena mencakup keluarga sangat miskin, maka penerima PKH secara otomatis adalah juga penerima Jamkesmas, Raskin, dan Bantuan Pendidikan untuk keluarga miskin.
- Penggunaan Basis Data Terpadu yang difasilitasi oleh TNP2K diarahkan kepada komplementaritas program

KOMPLEMENTARITAS DENGAN PROGRAM LAIN



- PNPM Generasi adalah *Community Conditional Cash Transfer*, yang seyogyanya merupakan komplementer dengan PKH → Komplementaritas program Klaster I dan Klaster II.
- Sinkronisasi lokasi PKH dengan lokasi PNPM Generasi.
- Sinkronisasi kegiatan Pendamping PKH dan Fasilitator PNPM.



5

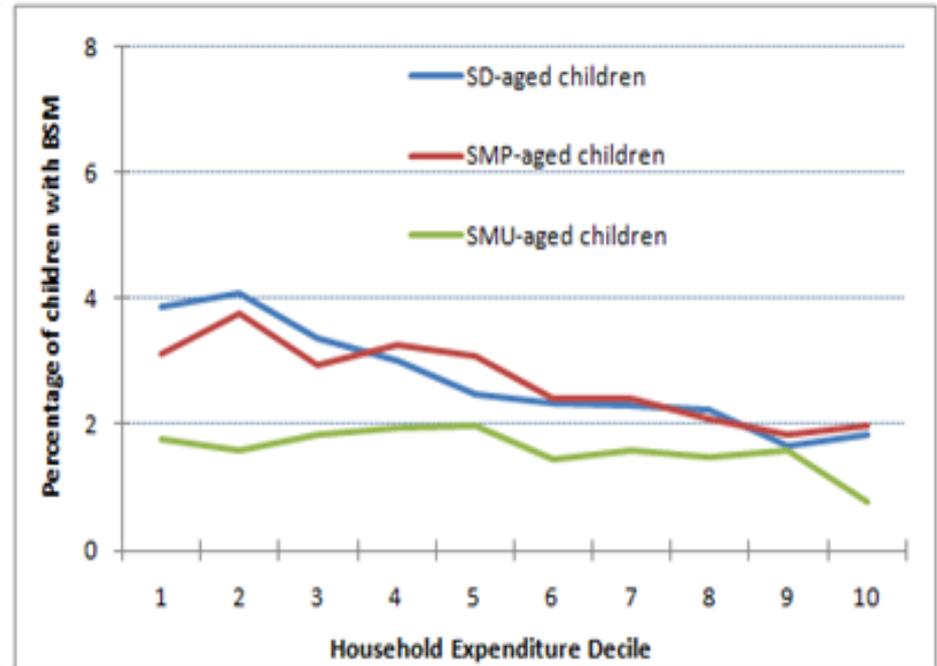
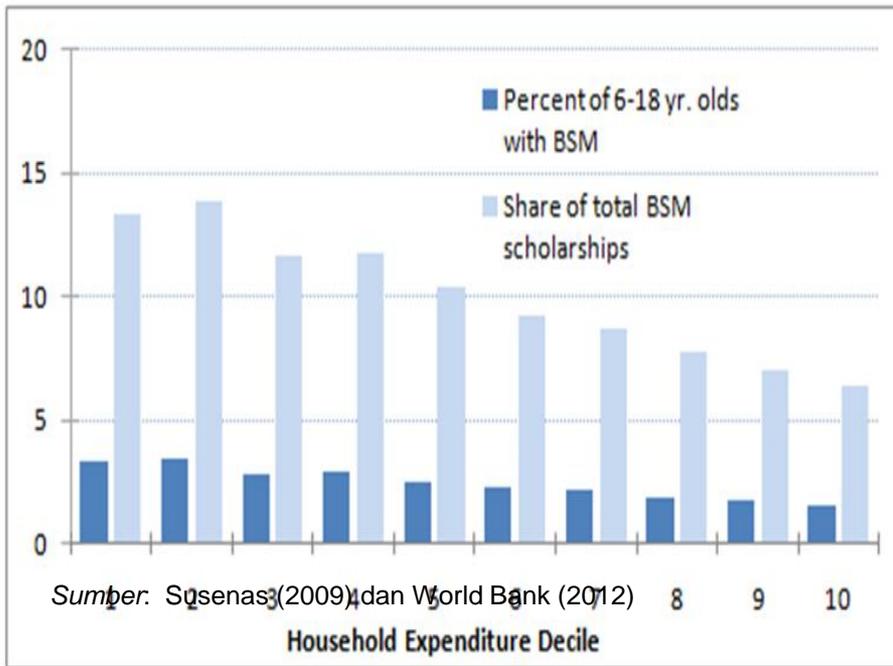
**BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK
SISWA MISKIN (BSM)**

ELEMEN EVALUASI BSM

- **Penetapan sasaran BSM menunjukkan adanya *inclusion & exclusion error*.** Alokasi BSM ditetapkan oleh sekolah pada siswa yang berada di sekolah.
- **Tidak memastikan keberlanjutan subsidi antar-tingkatan sekolah,** termasuk siswa transisi SD → SMP, atau SMP → SMA atau SMK.
- **Ketepatan jumlah/nilai BSM** mempengaruhi dampak BSM terhadap pendidikan siswa dari keluarga miskin
- **Ketepatan waktu penyaluran BSM** mempengaruhi keberlanjutan pendidikan siswa dari keluarga miskin

INCLUSION & EXCLUSION ERROR

Keberadaan inclusion & exclusion error ini berkaitan langsung dengan sistem penetapan sasaran yang berbasis sekolah dan bukannya kategori (tingkat kemiskinan) rumah tangga



KETEPATAN JUMLAH

BSM hanya menutup separuh dari biaya pendidikan

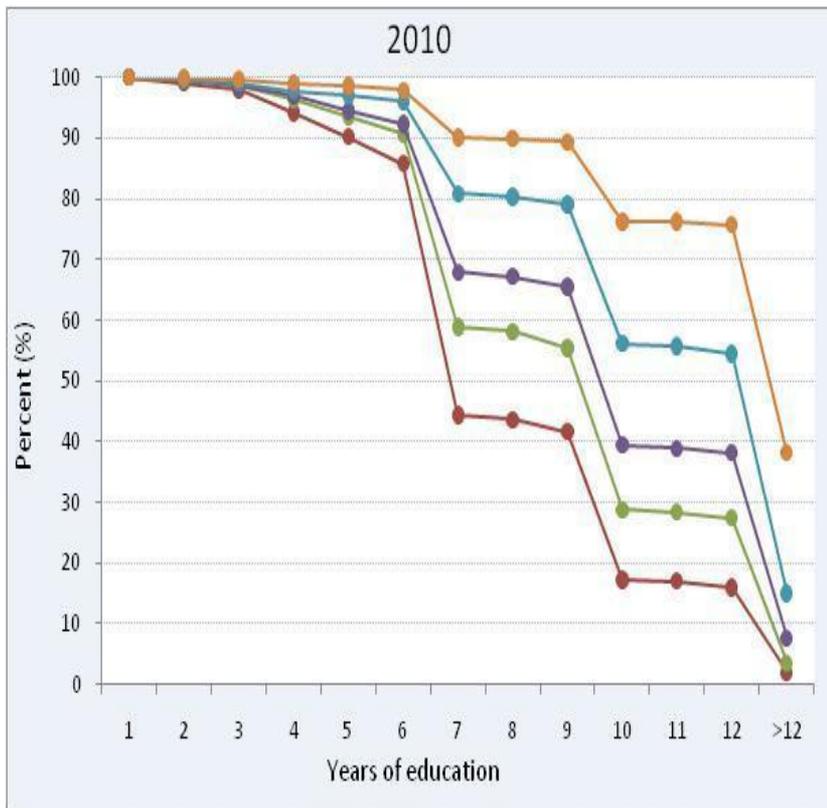
- Jumlah BSM hanya 5% dari garis kemiskinan rumah tangga (sekitar 15-30% pengeluaran garis kemiskinan individu)
- Kebutuhan biaya pendidikan, biaya pendukung & biaya transportasi (per tahun, dalam juta rupiah):

	Biaya Pendidikan	Biaya Pendukung	Biaya Transportasi
SD	1,0	0,4	0,7
SMP	2,0	0,8	1.1
SMA	2,5-3,0	1,6	1,0

- Bagi rumah tangga miskin, biaya pendidikan SMP atau SMA sekitar 30% dari seluruh pengeluaran rumah tangga.
- Perlu dipastikan agar RT penerima PKH juga menerima BSM

KETEPATAN WAKTU PENYALURAN BSM

Ketepatan waktu penyaluran BSM dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa dari keluarga miskin (antar jenjang kelas dan antar jenjang pendidikan)



- Tingkat putus sekolah lebih tinggi pada kelompok pendapatan yang lebih rendah
- Siswa dari kelompok dengan pendapatan rendah mulai keluar sekolah pada kelas 3
- BSM baru diterima pada bulan Agustus
Penyaluran Juni sangat rendah.
- Waktu kritis: saat akhir (Mei-Juni) dan awal tahun ajaran (Juli) terutama saat transisi jenjang pendidikan SD → SMP; SMP → SMA/SMA

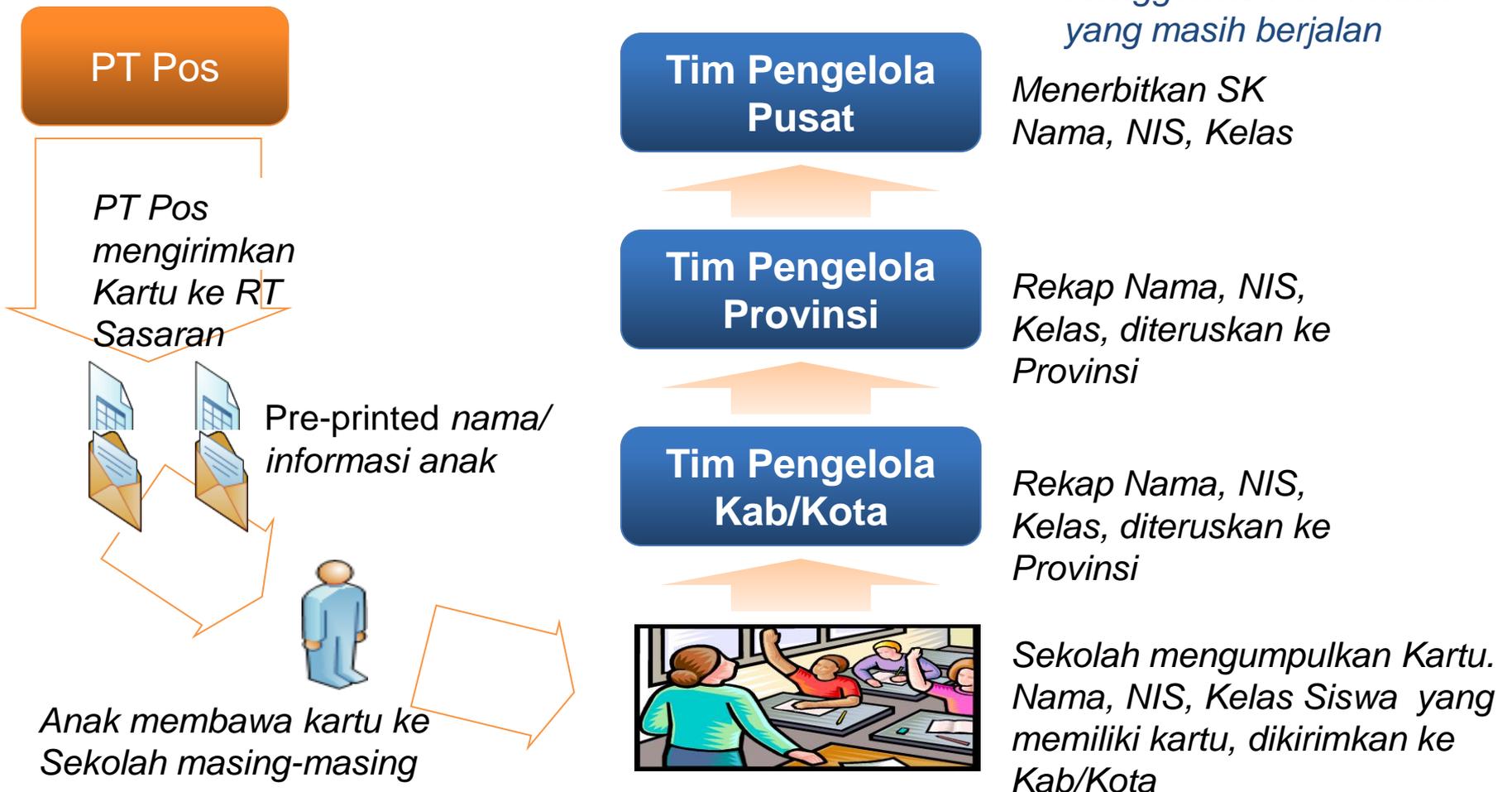
PENETAPAN SASARAN MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU

- Bantuan pendidikan seharusnya diberikan **tepat sasaran**
 - Kepada siswa dari keluarga sangat miskin, miskin, dan rentan menggunakan nama & alamat dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.
- **Anggaran yang memadai** semestinya disediakan untuk seluruh siswa dari keluarga sangat miskin
- Bantuan pendidikan semestinya lebih banyak **dialokasikan ke wilayah tertinggal**
 - Wilayah dengan rata-rata tingkat partisipasi yang lebih rendah dari tingkat rata-rata partisipasi nasional dan wilayah dengan angka putus sekolah dan ketidاكلulusan yang tinggi

DIUSULKAN: PENGUNAAN MEKANISME BARU PENETAPAN SASARAN PENERIMA BSM

- **Lebih tepat sasaran** dengan menjangkau anak dari keluarga sangat miskin, miskin, dan rentan (30% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah)
- Dapat **menjangkau mereka yang tidak bersekolah** dan **mendorong orangtua** untuk menyekolahkan anaknya
- **Memperbaiki data Basis Data Terpadu** yang tidak memiliki NIS dan nama/lokasi sekolah

USULAN MEKANISME BARU PENETAPAN SASARAN PENERIMA BSM





6 RASKIN

INDIKATOR KETEPATAN: BERAGAM HASIL

Indikator Keberhasilan	Pedoman Umum	SMERU	Susenas/ WB	TNP2K (2011)
Tepat sasaran	RTM (Q1 & Q2)	Sumbar: tepat Jatim: merata Sultra: merata/bergilir	Q1-Q2: 53% Q3-Q5: 47%	Banyak rumah tangga tidak miskin juga menerima
Tepat jumlah	10-20 kg	Sumbar: 10 kg Jatim: 4-7 kg Sultra: 4-10 kg	4 kg (2004, 2007, 2010)	Rata2: 5,75 kg; Semarang: 2,5 kg Deli Serdang: 8,9 kg
Tepat harga (Rp/kg)	1.000 / 1.600	Sumbar: 1.200-1.300 Jatim: 1.000 Sultra: 1.000-1.440	1.160 (2004) 1.225 (2005) 1.253 (2006)	Rata2: 2.122; Deli Serdang: 1.586 Barito Kuala: 2.863
Tepat waktu	Setiap bulan	Sumbar: setiap bulan Jatim: setiap bulan Sultra: setiap 1-4 bulan	5 x setahun	1-4 bulan sekali

TUJUAN MEKANISME BARU RASKIN

- Meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran Raskin
- Meningkatkan pemahaman penerima mengenai haknya mendapatkan Raskin sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan
- Mengujicoba mekanisme baru penyaluran Raskin untuk perbaikan masa depan

MEKANISME BARU RASKIN

Mekanisme penyaluran Raskin mulai Juni 2012 dijalankan seperti halnya metode yang saat ini sedang berjalan:

- Penyaluran beras dilaksanakan oleh BULOG s/d titik distribusi
- Mekanisme lain sebagaimana yang saat ini berjalan
- Menggunakan pagu nasional 2012 yang telah ditetapkan

Dengan perbaikan sbb.:

- Alokasi RT di setiap provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan penerima Raskin menggunakan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011
- Jumlah, nama dan alamat RT penerima di setiap desa diambil dari Basis Data Terpadu
- Pengumuman daftar RT penerima Raskin di setiap titik bagi (desa/kelurahan)
- Pengiriman Kartu Raskin bagi sekitar 1,3 juta RT terpilih – untuk melihat dampak pelaksanaan mekanisme baru

USULAN MEKANISME BARU: KARTU & NAMA DI TITIK BAGI



PENETAPAN ALOKASI, NAMA & ALAMAT

Mekanisme yang berjalan:

- Menko Kesra menetapkan alokasi Provinsi, Gubernur menetapkan alokasi Kab/Kota
- Bupati/Walikota menetapkan nama & alamat penerima
- Data nama & alamat didapatkan dari BPS Kab/Kota (berdasarkan PPLS 2008)

Mekanisme yang akan dijalankan:

- Menko Kesra menetapkan dan mengirimkan alokasi Provinsi dan Kab/Kota kepada Gubernur. Menko Kesra mengirimkan data nama & alamat RT penerima Raskin kepada Bupati/Walikota (seluruh data disiapkan Sekretariat TNP2K)
- Nota Kesepakatan penggunaan nama & alamat dari Basis Data Terpadu ditandatangani oleh Sekretariat TNP2K dan Kemenko Kesra

FAKTOR PERUBAHAN PAGU RASKIN 2012

Pagu Raskin sampai dengan saat ini dialokasikan berdasarkan Data PPLS 2008. Padahal, telah terjadi sejumlah perubahan signifikan di perekonomian antara tahun 2008 dan saat ini.

- **Variasi perubahan tingkat kemiskinan antara 2008 dan 2011** (misal Provinsi Maluku: tingkat kemiskinan turun sebesar 6,66% sementara rerata nasional hanya turun 2,93%)
- **Perubahan jumlah penduduk antara 2008 dan 2011** (misal karena kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk)
- **Laju pertumbuhan ekonomi regional yang cukup tinggi antara tahun 2008 dan 2011** (misal Provinsi Banten, rerata laju pertumbuhan PDRB 2006-2010: 8,95% sementara rerata nasional hanya tumbuh 5,62%)
- **Perbaikan metodologi pengumpulan dan pengolahan data PPLS11.**

WILAYAH PILOT KARTU RASKIN

Propinsi	Kabupaten
Jawa Timur (P. Madura)	Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
Sumatera Utara (P. Nias)	Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli
Bangka-Belitung	Seluruh kabupaten
Bali	Seluruh kabupaten
Nusa Tenggara Timur	Seluruh Kabupaten
Sulawesi Tenggara	Buton, Bombana, Bau-Bau, Wakatobi, Muna

Catatan: Total calon penerima Raskin di daerah pilot adalah 1.267.273 rumah tangga

RASKIN MASA DEPAN: PRINSIP UTAMA

- Raskin adalah program penanggulangan kemiskinan & perlindungan sosial di bidang pangan, dan bukan program stabilisasi harga beras
- Efektifitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan menanggulangi kemiskinan sangat tergantung kepada kecukupan *income transfer* & ketepatan sasaran kepada kelompok miskin
- Memastikan **kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat** tanpa terkendala dana

Usulan perbaikan mekanisme (jangka menengah mulai 2013):

- Raskin disalurkan secara gratis -- untuk kelompok miskin (yang hidup di bawah garis kemiskinan) yang lebih terbatas jumlahnya
- Raskin disalurkan dengan harga tebus -- untuk kelompok rentan

Lembaga Pengelola/Pelaksana :

- Memisahkan lembaga pengelola komoditas pangan dan lembaga penyalur Raskin

Usulan Perbaikan Jangka Panjang:

- Memberikan bantuan sosial pangan dalam bentuk tunai



7

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) - MANDIRI

LATAR BELAKANG

- PNPM dicanangkan oleh Presiden SBY pada tahun 2007 sebagai salah satu kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja
- Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki *local governance*, dan menciptakan aset untuk kelompok miskin
- Kelompok masyarakat yang terbentuk dimaksudkan untuk menghilangkan marginalisasi penduduk miskin dan menjadi model jaring pengaman sosial

KARAKTERISTIK

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

PNPM merupakan kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat

- Proses partisipatif dengan fasilitasi pemberdayaan penduduk miskin / marginal
- Alokasi dana langsung kepada kelompok masyarakat berbasis manajemen lokal
- Sistem yang transparan, terbuka, dengan pembinaan dan pengawasan/audit oleh masyarakat

MODAL SOSIAL
(kohesi, *trust* , gotong royong,)

KELOMPOK SOSIAL
(UPK, BKM, BumDes)

AKSES
(Layanan dasar, informasi, keuangan)

**MASYARAKAT
MANDIRI,
MAJU,
DAN SEJAHTERA**

VARIASI PELAKSANAAN PNPM

Hasil evaluasi Sekretariat TNP2K terhadap 11 PNPM yang sedang berjalan menunjukkan variasi dalam implementasi berbagai elemen kegiatan pemberdayaan masyarakat

**L
E
M
A
H**

1. FASILITASI / PENDAMPINGAN
2. PARTISIPASI KOMUNITAS
3. PENGORGANISASIAN KELOMPOK
4. TRANSPARANSI
5. SISTEM PENGAWASAN
6. PERSPEKTIF JENDER

**K
U
A
T**

PNPM MANDIRI MEMILIKI CAKUPAN NASIONAL

	2011	2012
PNPM Perdesaan	5.020 kec	5.100 kec
PNPM Perkotaan	1.153 kec (10.948 kel)	1.151 kec (10.930 kel)
PNPM PISEW	237 kec	237 kec
RIS PNPM / PPIP	215 kec (1.500 desa)	215 kec (1.237 desa)
PNPM P2DTK	-- 75 kab/kota	-- 80 kab/kota
CAKUPAN PNPM	6.625 kec	6.703 kec

Catatan:

1. Data bersumber dari unit MONEV Pokja Pengendali, Des 2011
2. P2DTK tidak eskplisit sasaran kec, tergantung hasil perencanaan/prioritas masyarakat
3. Jumlah kecamatan = **6.636 kecamatan** (sumber Ditjen KUM, Kemendagri, Mei 2010).

PERKEMBANGAN ANGGARAN PNPM 2007 – 2010 (MILIAR)

Program	2007	2008	2009	2010
PNPM Perdesaan	1.841	4.284,1	6.987,1	9.629
PNPM Perkotaan	1.994	1.414,8	1.737,0	1.509,5
PPIP	-	550.0	450	736.4
RIS-PNPM	-	-	500	489.5
PISEW	-	52.5	485.3	499.5
P2DTK	-	387.0	195,9	57.0
TOTAL	3.835	6.688,4	10.355,3	13.048.2

Sumber : BAPPENAS, 2010

Keterangan:

* Alokasi per kecamatan termasuk BLM dan TA, hanya dari APBN.

** Belum termasuk *Green KDP*. Alokasi/kecamatan berdasar jumlah kecamatan 2009.

PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA

Yang telah dibangun selama 2007-2010

Prarasana/Sarana	PNPM Mandiri Perdesaan	PNPM Mandiri Perkotaan
Jalan	65.500 km	64.445 km
Jembatan	9.000 unit	438 km
Saluran irigasi	11.000 unit	
Sistem Air Bersih	28.300 unit	1.210 km 100.653 unit
Drainase		17.506 km
MCK	17.500 unit	91.464 unit
Perbaikan/Pembangunan Sekolah	6.950 unit	
Beasiswa	120.000 siswa	
Puskemas/Pustu	5.700 unit	
Rumah Layak Huni		190.163 unit
Pembuangan Sampah		96.548 unit

Prasarana/Sarana lainnya meliputi :

- saluran limbah,
- saluran irigasi
- penerangan jalan
- tambatan perahu
- sarana pendidikan kesehatan, perdagangan



TERIMA KASIH